



## BUPATI MURUNG RAYA

Puruk Cahu, Mei 2018

Nomor : 903/ 218 /BPKAD/2018  
Sifat : Penting/ Segera  
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada  
Yth. Kepala BPK RI Perwakilan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
di -

PALANGKA RAYA

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Kabupaten Murung Raya memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Kabupaten Murung Raya telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah 31 Desember 2017 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal ini :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atas pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.

- c. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kabupaten Murung Raya dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
- d. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Keuangan Negara dan SAP.
- e. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah laporan keuangan.
- f. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya.

  
**PIC. BUPATI MURUNG RAYA,**  
  
**H. DARMAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	5.113.500.000,00	7.453.988.062,00	145,77	7.226.675.013,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.237.000.000,00	2.810.488.569,00	86,82	3.011.164.766,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.700.000.000,00	6.127.671.382,00	130,38	4.796.757.528,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	60.060.366.309,60	52.278.674.666,05	87,04	18.818.929.891,53
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>73.110.866.309,60</b>	<b>68.670.822.679,05</b>	<b>93,93</b>	<b>33.853.527.199,48</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak		31.539.956.000,00	24.349.983.962,00	77,20	43.521.697.029,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		130.583.727.000,00	113.147.355.051,00	86,65	151.182.589.382,00
Dana Alokasi Umum		667.654.598.000,00	667.654.598.000,00	100,00	678.555.108.000,00
Dana Alokasi Khusus		174.299.452.000,00	154.111.160.938,00	88,42	160.694.081.237,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>1.004.077.733.000,00</b>	<b>959.263.097.951,00</b>	<b>95,54</b>	<b>1.033.953.475.648,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Dana Penyesuaian		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		25.962.645.361,89	30.436.180.837,25	117,23	26.031.399.721,66
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>		<b>25.962.645.361,89</b>	<b>30.436.180.837,25</b>	<b>117,23</b>	<b>26.031.399.721,66</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.037.540.378.361,89</b>	<b>997.199.278.788,25</b>	<b>96,11</b>	<b>1.059.984.875.369,66</b>

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
<b>Transfer</b>					
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1	95.929.093.000,00	95.929.093.000,00	100,00	101.192.165.797,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>95.929.093.000,00</b>	<b>95.929.093.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101.192.165.797,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.206.580.337.671,49</b>	<b>1.161.799.194.467,30</b>	<b>96,29</b>	<b>1.195.030.568.366,14</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	449.755.056.302,67	429.347.960.577,00	95,46	373.157.294.378,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	213.704.922.682,42	197.051.298.065,84	92,21	303.600.460.452,04
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	19.942.094.922,00	19.363.486.364,00	97,10	7.795.168.259,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	70.863.799.639,50	69.258.894.013,00	97,74	120.328.651.344,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	7.440.800.000,00	6.780.832.300,00	91,13	4.248.360.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>761.706.673.546,59</b>	<b>721.802.471.319,84</b>	<b>94,76</b>	<b>809.129.934.433,04</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	4.552.174.841,41	3.819.357.500,00	83,90	3.912.479.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	23.900.791.433,00	20.715.659.337,00	86,67	31.873.870.590,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	79.581.806.190,00	70.560.938.042,75	88,66	88.539.938.119,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	131.570.639.649,86	123.225.737.584,50	93,66	261.851.527.972,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	1.338.208.300,00	1.292.856.886,00	96,61	2.231.227.730,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	227.815.000,00	224.785.000,00	98,67	103.838.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>241.171.435.414,27</b>	<b>219.839.334.350,25</b>	<b>91,15</b>	<b>388.512.881.911,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	500.000.000,00	75.000.000,00	15,00	587.982.250,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>587.982.250,00</b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.1.2</b>	<b>1.003.378.108.960,86</b>	<b>941.716.805.670,09</b>	<b>93,85</b>	<b>1.198.230.798.594,04</b>
<b>TRANSFER</b>					
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	511.350.000,00	487.350.000,00	95,31	757.500.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.3.1.2	323.700.000,00	308.700.000,00	95,37	0,00

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>5.1.3.1</b>	<b>835.050.000,00</b>	<b>796.050.000,00</b>	<b>95,33</b>	<b>757.500.000,00</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	445.000.000,00	245.000.000,00	55,06	1.622.500.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	178.907.206.100,00	178.907.206.100,00	100,00	104.273.838.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	796.522.896,00	796.522.896,00	100,00	745.652.844,00
<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.3.2</b>	<b>180.148.728.996,00</b>	<b>179.948.728.996,00</b>	<b>99,89</b>	<b>106.641.990.844,00</b>
<b>Jumlah Transfer</b>	<b>5.1.3</b>	<b>180.983.778.996,00</b>	<b>180.744.778.996,00</b>	<b>99,87</b>	<b>107.399.490.844,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>22.218.449.714,63</b>	<b>39.337.609.801,21</b>	<b>177,05</b>	<b>(110.599.721.071,90)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
Penggunaan SiLPATahunLalu	5.1.4.1.1	93.153.877.640,16	93.153.877.640,16	100,00	209.003.598.712,06
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>93.153.877.640,16</b>	<b>93.153.877.640,16</b>	<b>100,00</b>	<b>209.003.598.712,06</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	100,00	5.250.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.2</b>	<b>6.250.000.000,00</b>	<b>6.250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.250.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.4</b>	<b>86.903.877.640,16</b>	<b>86.903.877.640,16</b>	<b>100,00</b>	<b>203.753.598.712,06</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>109.122.327.354,79</b>	<b>126.241.487.441,37</b>	<b>115,69</b>	<b>93.153.877.640,16</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Pit. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (awal)	5.2.1	93.153.877.640,16	209.003.598.712,06
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	93.153.877.640,16	209.003.598.712,06
<b>Sub Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.2.3	126.241.487.441,37	93.153.877.640,16
<b>Sub Total</b>		<b>126.241.487.441,37</b>	<b>93.153.877.640,16</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih (akhir)</b>		<b>126.241.487.441,37</b>	<b>93.153.877.640,16</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Plt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NERACA (Audited)**

**Per 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	120.890.267.390,37	92.015.621.991,82
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	3.969.160,34
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	5.3.1.1.4	2.327.311.819,20	1.898.818.835,20
Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.5	168.902.525,98	567.090.896,79
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.6	3.756.564.118,00	37.659.518,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.7	15.087.259.686,54	14.338.840.943,78
Piutang Lainnya	5.3.1.1.8	694.847.622,00	721.724.014,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(1.377.942.745,72)	(1.245.160.763,12)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	125.446.016,00	135.990.410,00
Persediaan	5.3.1.1.11	54.742.986.927,02	76.421.812.437,57
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>196.415.643.359,39</b>	<b>184.896.367.444,38</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1.1	44.931.053.842,00	38.681.053.842,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>	<b>44.931.053.842,00</b>	<b>38.681.053.842,00</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>44.931.053.842,00</b>	<b>38.681.053.842,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	5.3.1.3.1	267.850.552.099,00	274.785.822.839,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	397.404.730.382,59	388.248.488.449,91
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.200.964.104.996,70	1.160.338.621.759,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.622.361.408.511,58	1.450.819.743.289,68
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	23.090.349.124,60	19.780.015.484,60
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	16.351.482.490,00	10.932.365.050,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(959.807.571.942,00)	(796.768.993.778,83)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>2.568.215.055.662,47</b>	<b>2.508.136.063.093,59</b>

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	1.711.081.432,00	1.711.081.432,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	1.003.058.435,21	710.209.643,54
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	64.733.064.891,90	7.949.526.750,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>67.447.204.759,11</b>	<b>10.370.817.825,54</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>2.877.008.957.622,97</b>	<b>2.742.084.302.205,51</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.711.081.432,00	1.712.613.611,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	361.129.680,33	365.710.339,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5.3.2.1.3	1.123.739.341,00	2.021.568.607,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	699.965.080,00	23.313.887.305,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>3.895.915.533,33</b>	<b>27.413.779.862,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.1	0,00	1.235.098.634,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>5.3.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.098.634,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>3.895.915.533,33</b>	<b>28.648.878.496,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		2.873.113.042.089,64	2.713.435.423.709,51
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>2.873.113.042.089,64</b>	<b>2.713.435.423.709,51</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.877.008.957.622,97</b>	<b>2.742.084.302.205,51</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Pt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**LAPORAN OPERASIONAL (Audited)**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**

**31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN- LO</b>			
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</b>			
Pendapatan Pajak Daerah- LO	5.4.1.1.1	6.914.598.767,00	6.288.715.397,00
Pendapatan Retribusi Daerah- LO	5.4.1.1.2	2.816.609.378,00	2.000.116.056,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO	5.4.1.1.3	6.127.671.382,00	4.796.757.528,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	5.4.1.1.4	56.655.943.822,72	20.016.573.957,53
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah- LO</b>		<b>72.514.823.349,72</b>	<b>33.102.162.939,48</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER- LO</b>			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO</b>	5.4.1.2.1		
Dana Bagi Hasil Pajak		24.349.983.962,00	43.521.697.029,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		113.147.355.051,00	151.182.589.382,00
Dana Alokasi Umum		667.654.598.000,00	678.555.108.000,00
Dana Alokasi Khusus		154.111.160.938,00	160.694.081.237,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO</b>		<b>959.263.097.951,00</b>	<b>1.033.953.475.648,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO</b>	5.4.1.2.2		
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Dana Penyesuaian		7.500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO</b>		<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>	5.4.1.2.3		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		26.589.325.636,01	23.282.766.317,38
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>26.589.325.636,01</b>	<b>23.283.766.317,38</b>

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>Pemerintah Daerah Lainnya – LO</b>			
<b>Bantuan Keuangan – LO</b>	<b>5.4.1.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer – LO</b>		<b>993.352.423.587,01</b>	<b>1.057.237.241.965,38</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO</b>			
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	1.232.561.180,00	415.883.554,00
Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	5.4.1.3.2	0,00	101.784.415.797,00
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO</b>		<b>1.232.561.180,00</b>	<b>102.200.299.351,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan – LO</b>		<b>1.067.099.808.116,73</b>	<b>1.192.539.704.255,86</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	429.591.928.390,00	373.157.294.378,00
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	197.353.609.971,39	307.263.688.459,00
Beban Bunga		0,00	0,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	749.482.325,00	7.795.168.259,00
Beban Hibah	5.4.2.1.4	91.152.004.252,00	120.520.412.360,00
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	25.394.836.339,00	4.248.360.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	180.641.205.065,33	152.837.028.696,28
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	527.315.822,14	411.566.583,85
Beban Lain-lain	5.4.2.1.8	2.495.775.811,00	5.496.377.576,00
<b>BEBAN TRANSFER</b>			
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.1	487.350.000,00	757.500.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.2.2	308.700.000,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.2.3	245.000.000,00	571.450.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.4	82.978.113.100,00	104.147.388.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.5	796.522.896,00	745.652.844,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>1.012.721.843.971,86</b>	<b>1.077.951.887.156,13</b>

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>54.377.964.144,87</b>	<b>114.587.817.099,73</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO		0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	22.848.720.594,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>(22.848.720.594,00)</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>54.377.964.144,87</b>	<b>114.587.817.099,73</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
PENDAPATAN (BEBAN) POS LUAR BIASA		0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.4	75.000.000,00	587.982.250,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>(75.000.000,00)</b>	<b>(587.982.250,00)</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL</b>		<b>54.302.964.144,87</b>	<b>91.151.114.255,73</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Plt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN ARUS KAS (Audited)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

Uraian	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		7.453.988.062,00	7.226.675.013,00
Penerimaan Retribusi Daerah		2.810.488.569,00	3.011.164.766,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.127.671.382,00	4.796.757.528,95
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		7.644.437.962,05	8.869.350.480,53
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		959.263.097.951,00	1.033.953.475.648,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		7.500.000.000,00	0,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		30.436.180.837,25	26.031.399.721,66
Penerimaan Lainnya		95.929.093.000,00	74.578.649.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>1.117.164.957.763,30</b>	<b>1.158.467.472.158,14</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Pembayaran Pegawai		427.799.040.577,00	368.075.206.686,00
Pembayaran Barang dan Jasa		159.505.366.545,84	274.768.341.523,04
Pembayaran Subsidi		19.363.486.364,00	7.795.168.259,00
Pembayaran Hibah		69.258.894.013,00	120.328.651.344,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.780.832.300,00	4.248.360.000,00
Pembayaran Tak Terduga		75.000.000,00	587.982.250,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		487.350.000,00	757.500.000,00
Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		308.700.000,00	0,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		245.000.000,00	1.622.500.000,00

Uraian	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		178.907.206.100,00	104.273.838.000,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		796.522.896,00	745.652.844,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>863.527.398.795,84</b>	<b>883.203.200.906,04</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>5.5.1</b>	<b>253.637.558.967,46</b>	<b>275.264.271.252,10</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin		1.182.311.800,00	565.770.000,00
Hasil Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan		0,00	17.100.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		48.625.000,00	86.626.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>1.230.936.800,00</b>	<b>669.496.000,00</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Perolehan Tanah		3.819.357.500,00	3.912.479.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		20.622.612.337,00	30.876.271.090,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		70.560.938.042,75	88.539.938.119,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		123.225.737.584,50	261.851.527.972,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.292.856.886,00	1.631.121.400,00
Perolehan Aset Lainnya		224.785.000,00	103.838.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.250.000.000,00	5.250.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.2.2</b>	<b>225.996.287.350,25</b>	<b>392.165.176.081,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>	<b>5.2.2</b>	<b>(224.765.350.550,25)</b>	<b>(391.495.680.081,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penerimaan Pinjaman		0,00	0,00

Uraian	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Daerah			
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>5.5.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>			
<b>ARUS KAS MASUK</b>			
Penerimaan PFK		58.938.007.612,45	85.203.929.628,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun lalu		2.436.981,34	942.711.413,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun lalu		0,00	788.530.673,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.4.1</b>	<b>58.940.444.593,79</b>	<b>86.935.171.714,00</b>
<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
Pengeluaran PFK		58.938.007.612,45	85.203.929.628,00
Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan		0,00	3.969.160,34
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.4.2</b>	<b>58.938.007.612,45</b>	<b>85.207.898.788,34</b>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>	<b>5.5.4</b>	<b>2.436.981,34</b>	<b>1.727.272.925,66</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>		<b>28.874.645.398,55</b>	<b>(114.504.135.903,24)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>92.015.621.991,82</b>	<b>206.519.757.895,06</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>		<b>120.890.267.390,37</b>	<b>92.015.621.991,82</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>		<b>120.890.267.390,37</b>	<b>92.015.621.991,82</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>0,00</b>	<b>3.969.160,34</b>

Uraian	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		3.756.564.118,00	37.659.518,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN		2.327.311.819,20	1.898.818.835,20
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		168.902.525,98	567.090.896,79
Saldo Akhir Kas		127.143.045.853,55	94.523.160.402,15

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Plt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. Darmaji**



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

URAIAN	Ref	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Ekuitas Awal	5.6.1	2.713.435.423.709,51	2.597.865.802.182,87
Surplus (Defisit) - LO	5.6.2	54.302.964.144,87	91.151.114.255,73
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>			
Koreksi Nilai Persediaan			177.611.172,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS Pusat dan Propinsi			(24.005.000,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya		105.374.654.235,26	24.264.901.098,91
<b>Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>5.6.3</b>	<b>105.374.654.235,26</b>	<b>24.418.507.270,91</b>
<b>Ekuitas (akhir)</b>	<b>5.6.4</b>	<b>2.873.113.042.089,64</b>	<b>2.713.435.423.709,51</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

**Plt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang disajikan bagi pengguna informasi keuangan Pemerintah Daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan dibuat untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017; dan
35. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.



### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### *Bab I Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD*

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

#### *Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

#### *Bab IV Kebijakan Akuntansi*

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### *Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Neraca
- 5.4. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Informasi Lainnya

#### *Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan*

#### *Bab VII Penutup*



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Murung Raya tahun 2016 menurut harga berlaku mencapai 6,14 triliun rupiah, sedang menurut harga konstan 2010 bernilai 4,95 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Murung Raya tahun 2016 mencapai 5,68 persen, terendah dalam 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan pada tahun tersebut didorong oleh besarnya permintaan batubara dalam negeri.

Pertambangan dan penggalian masih menjadi *leading sector* ekonomi Murung Raya. Kontribusi kategori tersebut terhadap perekonomian mencapai 50,20 persen. Setelah sempat menurun, akhirnya di tahun 2016 seiring dengan harga batubara dunia yang kembali menggeliat, kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Murung Raya kembali meningkat. Kemudian, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi lapangan usaha penopang perekonomian kedua setelah pertambangan. Nilai kontribusi yang diberikan berkisar antara 11 hingga 12 persen, dengan kecenderungan terus menurun setiap tahunnya. Penurunan harga komoditas karet serta pembatasan eksplorasi hasil hutan turut menyebabkan fluktuatifnya kontribusi kategori tersebut.

Apabila ditinjau dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Murung Raya belum mengalami perubahan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi masih menjadi komponen dengan *share* terbesar setiap tahunnya.

Tingkat kepadatan Murung Raya hanya mencapai 5 (lima) orang per km<sup>2</sup> dan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah di provinsi Kalimantan Tengah. Posisi geografis yang berada di ujung timur laut Kalimantan Tengah serta tidak dilalui oleh jalur trans Kalimantan menyebabkan daerah ini relatif sepi penduduk. Jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat, tingkat kepadatan penduduk Murung Raya hanya sepertiga kepadatan penduduk Barito Utara.

Dari 34 provinsi di Indonesia, Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan ke 14 terbesar dengan nilai 2,22 juta rupiah. Masih jauh lebih rendah jika dibandingkan UMP DKI Jakarta yang mencapai 3,35 juta rupiah. Upah Minimum Kabupaten di Kalteng tidak jauh berbeda yaitu antara 2,1-2,2 juta rupiah per bulan kecuali daerah Murung Raya yang upah minimumnya mencapai 2,5 juta rupiah. Harga-harga kebutuhan pokok yang relatif lebih mahal menyebabkan UMK Murung Raya tertinggi se Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tahun 2016 mencapai 112.976 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sekitar 7.140 jiwa atau 6,32 persen dari jumlah penduduk. Persentase tersebut menduduki peringkat keempat tertinggi di Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Barito Utara, persentase penduduk miskin Murung Raya masih tergolong tinggi.



## **Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya tahun 2016 mencapai 5,68 persen melambat 1,20 point dari tahun sebelumnya. Angka tersebut paling rendah sepanjang lima tahun terakhir menjadikan peringkat pertumbuhan ekonomi Murung Raya merosot ke peringkat 10 di Kalimantan Tengah. Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah, pertumbuhan ekonomi Murung Raya berada pada golongan menengah ke bawah. Sebagai salah satu daerah pemekaran, kondisi ini tergolong wajar.

Dalam pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya yang menyeluruh, tidak hanya sektor ekonomi yang menjadi fokus utama, sektor kesehatan dan pendidikan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Indeks pembangunan manusia Murung Raya tahun 2016 mencapai 66,96 dan termasuk dalam kriteria IPM sedang. Jika dibandingkan antar wilayah, peringkat IPM Murung Raya berada pada posisi kesebelas turun satu peringkat dari tahun lalu. Peringkat ini cenderung terus menurun dalam tiga tahun terakhir.

Pembangunan manusia merupakan proses perluasan kemampuan bagi penduduk dalam mengakses komponen dasar kualitas hidup yang meliputi kesehatan, pendidikan dan memperoleh pendapatan. Dari ketiga komponen tersebut, komponen pendidikan Murung Raya yang paling rendah. Program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah perlu dibenahi lagi.

### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### **Kebijakan Pendapatan Daerah**

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 diarahkan pada.

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Menggali potensi/sumber-sumber pendapatan baru;



- d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain untuk penanaman modal di Kabupaten Murung Raya;
- e. Mengevaluasi program/kegiatan pada unit kerja yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. Peningkatan koordinasi dengan tingkat pusat dan provinsi, untuk dapat meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan.

Dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah, maka strategi dan prioritas pendapatan asli daerah yang dilakukan antara lain.

- a. Pengembangan objek dan subjek pajak/retribusi daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- c. Penegakan hukum secara bertahap dan selektif;
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- e. Perbaikan sistem pungutan;
- f. Perwujudan syarat pemungut yang profesional; dan
- g. Pengembangan objek baru.

Dalam rangka pencapaian target Pendapatan di bidang Dana Perimbangan, maka strategi dan prioritas yang dilakukan antara lain.

- a. Evaluasi data-data pendukung untuk tujuan DAU;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan departemen teknis di tingkat pusat; dan
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk dana dekonsentrasi.

#### **Kebijakan Belanja Daerah**

Program dan kegiatan daerah telah tertuang dalam RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang disesuaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewajaran antara anggaran dengan target kinerja dari setiap unit kerja, yang dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

- a. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari.

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil



7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Dengan memperhatikan kondisi umum Belanja Daerah maka Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diarahkan pada :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah;
- b. Pemenuhan belanja sesuai urgensi dan prioritas pada masing-masing unit kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Dalam rangka memenuhi Anggaran Belanja Daerah yang diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, maka strategi dan prioritas yang digunakan adalah :

- a. Peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- b. Pengalokasian Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 untuk menutup defisit anggaran belanja daerah;
- c. Pemenuhan Belanja Pegawai baik pada komponen Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung;
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pada seluruh komponen belanja daerah;
- e. Penyediaan anggaran untuk kegiatan di luar Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung; dan
- f. Pengoptimalan pendapatan daerah untuk mencukupi belanja daerah.

### **Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.



Dengan memperhatikan kondisi umum pembiayaan, maka kebijakan umum pembiayaan Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk :

- a. Mencatat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai Penerimaan Daerah;
- b. Mencatat penerimaan piutang sebagai penerimaan daerah;
- c. Menganggarkan penerimaan piutang pada pemerintahan daerah; dan
- d. Menganggarkan utang pokok yang jatuh tempo pada pengeluaran daerah.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pencapaian kinerja menurut urusan Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang pelaporannya disajikan dalam buku tersendiri dalam bentuk matrik dan kolom realisasi.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diklasifikasikan menurut Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017. Penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.003.378.108.960,86 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp761.706.673.546,59 Belanja Modal sebesar Rp241.171.435.414,27 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp500.000.000,00.

Anggaran Transfer Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp180.983.778.996,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp835.050.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp180.148.728.996,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2017 adalah sebesar Rp941.716.805.670,09 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp721.802.471.319,84 realisasi Belanja Modal sebesar Rp219.839.334.350,25 dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp75.000.000,00.

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2017 sebesar Rp180.744.778.996,00 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp796.050.000,00 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp179.948.728.996,00.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.206.580.337.671,49 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp73.110.866.309,60. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.037.540.378.361,89 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp95.929.093.000,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya tahun 2017 sebesar Rp1.161.799.194.467,30 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp68.670.822.679,05, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp997.199.278.788,25 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp95.929.093.000,00.

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target urusan umum pemerintahan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang selalu mengalami perubahan;
- b. Masih kurang sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Kurang kepedulian dari para penyelenggara pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Realisasi APBD masih menumpuk di Bulan Desember.



### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA**

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.206.580.337.671,49 dan terealisasi sebesar Rp1.161.799.194.467,30 atau terealisasi sebesar 96,29%.

Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp941.716.805.670,09 dari anggaran sebesar Rp1.003.378.108.960,86 atau terealisasi sebesar 93,85%. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp721.802.471.319,84 atau 94,76% dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp761.706.673.546,59, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp219.839.334.350,25 atau 91,15% dari anggaran belanja modal sebesar Rp241.171.435.414,27 kemudian dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp75.000.000,00 atau 15,00% dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp500.000.000,00.

Transfer terealisasi sebesar Rp180.744.778.996,00 atau 99,87% dari anggaran belanja transfer sebesar Rp180.983.778.996,00.

Pembiayaan Neto terealisasi sebesar Rp86.903.877.640,16 atau 100% dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp86.903.877.640,16 dengan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp126.241.487.441,37.

##### **3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan**

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2017 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan *summary* sebagai berikut.

###### **a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah**

Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berikut beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

- 1) Terkait dengan penerimaan Retribusi Daerah pada SOPD secara umum masih relatif di bawah target minimal 90% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh SOPD.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

---

- 2) Penerimaan pendapatan sangat tergantung kondisi perekonomian nasional dan regional seperti tingkat inflasi, nilai kurs rupiah terhadap dolar dan tingkat suku bunga yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan membayar masyarakat terhadap kewajibannya sebagai warga Negara.
  - 3) Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan database objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
  - 4) Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai.
  - 5) Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
  - 6) Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
  - 7) Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
  - 8) Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
  - 9) Terkait dengan penerimaan retribusi pada SOPD secara umum masih dibawah tahapan target minimal (80%) karena pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh setiap SOPD pemungut belum optimal.
  - 10) Data potensi riil subjek dan objek retribusi daerah tidak disampaikan secara rutin oleh SOPD terkait sebagai dasar penetapan target.
- b. Permasalahan Utama Belanja Daerah
- Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:
- 1) Kemampuan pendanaan PAD masih lemah.
  - 2) Kemampuan identifikasi indikator kinerja kegiatan masih lemah.
  - 3) *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja belum optimal.
  - 4) Rincian atau uraian objek belanja tidak konsisten dengan tujuan kegiatan.
- c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan
- 1) Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
    - a) Kurangnya kompetensi, budaya kerja, kedisiplinan dan produktivitas aparat;
    - b) Kinerja organisasi perangkat daerah belum efisien dan efektif;
    - c) Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat;
    - d) Sumber pendapatan dan aset daerah belum mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah;
    - e) Masih kurangnya kuantitas, kualitas, aksesibilitas data dan informasi, serta pelayanan berbasis teknologi informasi;



## ***Pemerintah Kabupaten Murung Raya***

### ***Catatan Atas Laporan Keuangan***

***Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016***

---

- f) Keterbatasan sumber daya pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan pelayanan masyarakat;
  - g) Adanya kesenjangan kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah daerah;
  - h) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - i) Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan dan pemerataan pembangunan;
  - j) Kemampuan masyarakat dalam inovasi, pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) masih kurang;
  - k) Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dan aparat masih kurang.
- 2) Fungsi Hukum dan Keamanan
- a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
  - b) Tidak konsistensinya aparatatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
  - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
  - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban;
  - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.
- d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia
- 1) Fungsi Pendidikan
- a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
  - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dan belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
  - c) Penuntasan wajar DIKDAS (9 tahun) yang belum optimal;
  - d) Sarana peningkatan kreatifitas siswa, laboratorium serta prasarana olahraga masih kurang;
  - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
- 2) Fungsi Kesehatan
- a) Belum terpenuhinya rumah sakit daerah yang representatif;
  - b) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- c) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
  - d) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
  - e) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai;
  - f) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- 3) Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
  - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
  - d) Rendahnya akses terhadap modal;
  - e) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan;
  - f) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
- 4) Fungsi Sosial Kemasyarakatan
- a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;
  - b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
  - c) Terbatasnya akses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan;
  - d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan Napza.
- 5) Fungsi Agama dan Moralitas
- a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
  - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.
- e. Bidang Infrastruktur
- 1) Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
- a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
  - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;
  - c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil.
- 2) Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
  - a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
  - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
  - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
  - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik;
  - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
  - 1) Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
    - a) Pertanian
      - (1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
      - (2) Kebutuhan perعتakan sawah meningkat;
      - (3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
      - (4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
      - (5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah;
      - (6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
    - b) Perkebunan
      - (1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;
      - (2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum terkelola dengan baik;
      - (3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
      - (4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal;
      - (5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
  - 2) Fungsi Pariwisata
    - a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
    - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
    - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
- 3) Fungsi Migas dan Energi
  - a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang;
  - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
- 4) Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
  - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
  - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
  - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi;
  - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
- 5) Fungsi Lingkungan Hidup
  - a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
  - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
  - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d) Maraknya penambangan galian C yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pada tahun anggaran 2017, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cq. Bidang Akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2017, terdiri dari :

<b>No</b>	<b>Kode SOPD</b>	<b>Dinas/ Badan/UnitSatuanKerja</b>
1.	1.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	1.2.1	Dinas Kesehatan
3.	1.2.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	1.2.2.2	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
5.	1.3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	1.4.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7.	1.5.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	1.5.3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9.	1.6.1	Dinas Sosial
10.	2.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigari
11.	2.3.1	Dinas Ketahanan Pangan
12.	2.5.1	Dinas Lingkungan Hidup
13.	2.5.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.	2.6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Kode SOPD	Dinas/ Badan/UnitSatuanKerja
15.	2.7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	2.8.1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	2.9.1	Dinas Perhubungan
18.	2.10.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
19.	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	2.18.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21.	3.2.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22.	3.3.1	Dinas Pertanian dan Perikanan
23.	3.6.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24.	4.1.1	DPRD
25.	4.1.2	KDH & WKDH
26.	4.1.3	Sekretariat Daerah
27.	4.1.4	Sekretariat DPRD
28.	4.1.11	Kecamatan Murung
29.	4.1.12	Kecamatan Tanah Siang
30.	4.1.13	Kecamatan Laung Tuhup
31.	4.1.14	Kecamatan Permata Intan
32.	4.1.15	Kecamatan Sumber Barito
33.	4.1.16	Kecamatan Tanah Siang Selatan
34.	4.1.17	Kecamatan Barito Tuhup Raya
35.	4.1.18	Kecamatan Sungai Babuat
36.	4.1.19	Kecamatan Uut Murung
37.	4.1.20	Kecamatan Seribu Riam
38.	4.2.1	Inspektorat
39.	4.3.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
40.	4.4.5.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
41.	4.4.5.2	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Kode SOPD	Dinas/ Badan/UnitSatuanKerja
42.	4.4.6	Badan Pendapatan Daerah
43.	4.5.8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SOPD sebagai entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SOPD

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Arus Kas (LAK);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPKD

Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh menghasilkan:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan



penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.



### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

#### **Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan investasi permanen lainnya.



Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

### **Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulansetelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal darisaldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### **Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

**Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

**Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dariimbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.



## BAB V

### PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### **5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **5.1.1. Pendapatan**

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.161.799.194.467,30 dan Rp1.195.030.568.366,14.

##### **5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp68.670.822.679,05 dan Rp33.853.527.199,48.

##### **5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.453.988.062,00 dan Rp7.226.675.013,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pajak Hotel	60.000.000,00	62.348.000,00	103,91	61.421.500,00
2.	Pajak Restoran	2.018.500.000,00	4.592.516.705,00	227,52	4.198.879.122,00
3.	Pajak Hiburan	60.000.000,00	22.702.500,00	37,84	29.457.500,00
4.	Pajak Reklame	250.000.000,00	145.354.139,00	58,14	140.854.114,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	1.250.000.000,00	2.056.593.460,00	164,53	1.515.491.289,00
6.	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	78.000.000,00	104,00	53.100.000,00
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.298.450,00	0,00	55.729.105,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.275.000.000,00	368.516.583,00	28,90	1.045.367.087,00
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	125.000.000,00	126.658.225,00	101,33	126.375.296,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.113.500.000,00</b>	<b>7.453.988.062,00</b>	<b>145,77</b>	<b>7.226.675.013,00</b>

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

*Official Assesment* merupakan Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib



## Pemerintah Kabupaten Murung Raya

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah. *Official Assesment* terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.810.488.569,00 dan Rp3.011.164.766,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	1.732.000.000,00	1.850.999.386,00	106,87	1.933.984.249,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.020.000.000,00	816.654.000,00	80,06	898.737.500,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	485.000.000,00	142.835.183,00	29,45	178.443.017,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.237.000.000,00</b>	<b>2.810.488.569,00</b>	<b>86,82</b>	<b>3.011.164.766,00</b>

#### **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Realisasi Retribusi Jasa Umum untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.850.999.386,00 dan Rp1.933.984.249,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	487.500.000,00	726.317.355,00	148,99	775.897.549,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas Pembantu	487.500.000,00	4.710.000,00	0,97	9.131.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD	0,00	608.798.931,00	0,00	856.326.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.000.000,00	85.010.000,00	65,39	79.284.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00	5.150.000,00	25,75	14.850.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	50.000.000,00	25.600.000,00	51,20	29.458.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Pasar-Los	154.000.000,00	329.505.600,00	213,96	136.565.200,00
8.	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	3.000.000,00	0,00	0,00	3.005.000,00
9.	Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	150.000.000,00	65.907.500,00	43,94	29.467.500,00
10.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.732.000.000,00</b>	<b>1.850.999.386,00</b>	<b>106,87</b>	<b>1.933.984.249,00</b>

#### **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah. Realisasi Retribusi Jasa Usaha untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp816.654.000,00 dan Rp898.737.500,00 dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	225.000.000,00	257.050.000,00	114,24	228.620.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	75.000.000,00	44.700.000,00	59,60	86.400.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	510.000.000,00	386.900.000,00	75,86	524.850.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kursi, Tenda dan Sound System	10.000.000,00	8.225.000,00	82,25	0,00
5.	Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00	76.850.000,00	256,17	32.300.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	95.000.000,00	22.287.000,00	23,46	12.645.000,00
8.	Retribusi Tempat Rekreasi	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
9.	Retribusi Tempat Pariwisata	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
10.	Retribusi Tempat Olahraga	65.000.000,00	19.392.000,00	29,83	11.822.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.020.000.000,00</b>	<b>816.654.000,00</b>	<b>80,06</b>	<b>898.737.500,00</b>

**Retribusi Perijinan Tertentu**

Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp142.835.183,00 dan Rp178.443.017,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	170.000.000,00	46.052.750,00	27,09	38.784.000,00
2.	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	36.146.347,00	24,10	32.696.810,00
3.	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	150.000.000,00	60.636.086,00	40,42	106.962.207,00
4.	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>485.000.000,00</b>	<b>142.835.183,00</b>	<b>29,45</b>	<b>178.443.017,00</b>

**5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.127.671.382,00 dan Rp4.796.757.528,95.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng	4.700.000.000,00	6.127.671.382,00	130,38	4.796.757.528,95
	<b>Jumlah</b>	<b>4.700.000.000,00</b>	<b>6.127.671.382,00</b>	<b>130,38</b>	<b>4.796.757.528,95</b>

**5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp52.278.674.666,05 dan Rp18.818.929.891,53, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	120.000.000,00	1.230.936.800,00	1025,78	669.496.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	0,00	5.322.625.369,00	0,00	6.315.414.548,60
3.	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	147.588.043,00	0,00	274.238.047,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	9.255.229,00	0,00	8.428.355,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	4.709.001,00	0,00	14.526.001,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	267.595.400,00
8.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	6.755.378,00	0,00	12.367.926,00
9.	Pendapatan BLUD RSUD	25.000.000.000,00	26.184.211.896,00	104,73	9.280.083.411,00
10.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	14.330.000.000,00	2.125.395.872,05	14,83	1.976.780.202,93
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.265.246.309,60	2.555.048.008,00	112,79	0,00
12.	Pendapatan yang Bersumber dari Dana BOS	18.345.120.000,00	14.664.040.000,00	79,93	0,00
13.	Pendapatan dari Pengembalian Dana Sertifikasi	0,00	28.109.070,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.060.366.309,60</b>	<b>52.278.674.666,05</b>	<b>87,04</b>	<b>18.818.929.891,53</b>

**5.1.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp997.199.278.788,25 dan Rp1.059.984.875.369,66.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.004.077.733.000,00	959.263.097.951,00	95,54	1.033.953.475.648,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.962.645.361,89	30.436.180.837,25	117,23	26.031.399.721,66



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

	<b>Jumlah</b>	<b>1.037.540.378.361,89</b>	<b>997.199.278.788,25</b>	<b>96,11</b>	<b>1.059.984.875.369,66</b>
--	---------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------

**5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp959.263.097.951,00 dan Rp1.033.953.475.648,00.

**5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak**

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.349.983.962,00 dan Rp43.521.697.029,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	16.226.818.000,00	13.878.827.904,00	85,53	34.137.487.822,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	31.983.000,00	17.590.650,00	55,00	14.722.850,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	4.046.015.000,00	2.225.308.250,00	55,00	2.710.961.100,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	7.640.039.000,00	6.048.595.596,00	79,17	6.658.460.521,00
5.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	197.146.000,00	49.395.889,00	25,06	64.736,00
6.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Bagian Pemerintah Pusat	3.397.955.000,00	2.130.265.673,00	62,69	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.539.956.000,00</b>	<b>24.349.983.962,00</b>	<b>77,20</b>	<b>43.521.697.029,00</b>

**5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)**

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp113.147.355.051,00 dan Rp151.182.589.382,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	3.638.272.000,00	2.480.281.151,00	68,17	13.181.433.041,00
2.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	10.975.164.000,00	7.750.096.868,00	70,61	8.748.210.490,00
3.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0,00	8.237.554.414,00	0,00	23.353.659.495,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	39.944.905.000,00	29.247.470.700,00	73,22	32.085.359.727,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	74.195.274.000,00	64.756.315.015,00	87,28	72.882.022.842,00
6.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	447.937.200,00	30,00	452.025.539,00
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	40.978.000,00	25.232.081,00	61,57	318.117.448,00
8.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	296.010.000,00	202.467.622,00	68,40	161.760.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.583.727.000,00</b>	<b>113.147.355.051,00</b>	<b>86,65</b>	<b>151.182.589.382,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.1.1.2.1.3. Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum**

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp667.654.598.000,00 dan Rp678.555.108.000,00.

**5.1.1.2.1.4. Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus**

Realisasi Pendapatan Transfer - Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp154.111.160.938,00 dan Rp160.694.081.237,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	68.950.000.000,00	67.527.605.000,00	97,94	0,00
2.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	4.299.456.000,00	1.289.700.000,00	30,00	0,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.747.034.000,00	1.424.100.000,00	30,00	0,00
4.	DAK Bidang Kesehatan	20.482.845.000,00	16.386.322.250,00	80,00	6.119.944.987,00
5.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	00,00	122.190.000,00
6.	DAK Bidang Pertanian	2.732.615.000,00	2.208.046.000,00	80,80	0,00
7.	DAK Bidang Pendidikan	10.702.706.000,00	5.886.533.000,00	55,00	605.957.000,00
8.	DAK Transportasi	0,00	0,00	0,00	68.094.250,00
9.	DAK Sarana dan Prasarana Perdagangan	1.728.872.000,00	1.584.832.000,00	91,67	543.336.000,00
10.	DAK Sarana dan Prasarana Penunjang	0,00	0,00	0,00	89.939.335.000,00
11.	DAK Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	0,00	0,00	0,00	86.601.000,00
12.	DAK Kedaulatan Pangan	0,00	0,00	0,00	997.721.000,00
13.	DAK Infrastruktur Publik Daerah	0,00	0,00	0,00	22.950.847.000,00
14.	DAK Non Fisik	60.655.924.000,00	57.804.022.688,00	95,30	39.260.055.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>174.299.452.000,00</b>	<b>154.111.160.938,00</b>	<b>88,42</b>	<b>160.694.081.237,00</b>

**5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya merupakan Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp30.436.180.837,25 dan Rp26.031.399.721,66 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.906.528.486,90	3.267.264.442,56	112,41	3.040.575.642,46
2.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.721.484.167,31	2.678.209.692,12	71,97	3.844.655.986,59



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.405.238.419,66	18.615.687.833,25	138,87	14.606.988.071,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10.784.585,42	22.031.620,37	204,29	18.080.961,90
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.918.609.702,60	5.852.987.248,95	98,89	4.521.099.059,71
	<b>Jumlah</b>	<b>25.962.645.361,89</b>	<b>30.436.180.837,25</b>	<b>117,23</b>	<b>26.031.399.721,66</b>

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp95.929.093.000,00 dan Rp101.192.165.797,00.

**5.1.1.3.1. Lain-lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Lainnya**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah - Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp95.929.093.000,00 dan Rp101.192.165.797,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pendapatan Lainnya	95.929.093.000,00	95.929.093.000,00	100	74.578.649.000,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	2.410.672.197,00
3.	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	24.202.844.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.929.093.000,00</b>	<b>95.929.093.000,00</b>	<b>100</b>	<b>101.192.165.797,00</b>

Nilai Pendapatan Lainnya sebesar Rp95.929.093.000,00 merupakan Dana Desa Tahap 1 sebesar Rp57.557.455.000,00 dan Dana Desa Tahap 2 sebesar Rp38.371.638.000,00.

**5.1.2. Belanja**

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp941.716.805.670,09 dan Rp1.198.230.798.594,04.

**5.1.2.1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp721.802.471.319,84 dan Rp809.129.934.433,04.

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp429.347.960.577,00 dan Rp373.157.294.378,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	194.119.636.131,25	183.442.475.432,00	94,50	192.583.769.578,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	166.608.792.457,65	159.319.091.555,00	95,62	170.882.664.894,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.340.000.000,00	3.263.910.000,00	97,72	2.289.600.000,00
4.	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - P2	0,00	0,00	0,00	76.372.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016**

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
5.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	181.925.000,00	181.925.000,00	100,00	339.127.714,00
6.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	161.850.000,42	64.740.000,00	40,00	0,00
7.	Belanja Uang Lembur	1.837.085.285,16	1.785.337.000,00	97,18	1.903.672.500,00
8.	Honorarium PNS	17.390.915.760,00	16.491.145.000,00	94,82	0,00
9.	Honorarium Non PNS	64.339.851.668,19	63.206.016.590,00	98,24	0,00
10.	Belanja Pegawai - Dana BOS	0,00	0,00	0,00	5.082.087.692,00
11.	Belanja Pegawai – BLUD	1.730.600.000,00	1.548.920.000,00	89,50	0,00
12.	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>449.755.056.302,67</b>	<b>429.347.960.577,00</b>	<b>95,46</b>	<b>373.157.294.378,00</b>

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.785.400.883,14	198.050.842.155,00	97,19	216.208.284.409,00
2.	Dinas Kesehatan	46.244.408.666,33	45.561.756.646,00	98,52	33.691.165.439,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	20.421.196.831,60	19.690.391.587,00	96,42	16.433.308.518,00
4.	BLUD RSUD	1.730.600.000,00	1.548.920.000,00	89,50	0,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.844.283.315,20	10.361.823.462,00	95,55	4.619.426.066,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.922.112.460,00	2.962.620.960,00	75,54	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.420.214.569,70	3.303.694.347,00	96,59	2.264.444.021,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.422.734.678,72	5.293.058.325,00	97,61	1.224.069.415,00
9.	Dinas Sosial	4.837.003.850,34	3.682.522.351,00	76,13	2.485.408.749,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.104.252.742,29	2.665.862.854,00	85,88	0,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	3.441.424.521,00	3.404.265.245,00	98,92	1.129.962.704,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	4.174.081.501,06	4.078.840.262,00	97,72	2.204.901.943,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.297.525.000,00	3.082.921.144,00	93,49	2.090.312.769,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.952.057.398,20	3.876.372.304,00	98,08	2.460.909.962,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.989.153.956,08	5.640.604.820,00	94,18	2.434.344.852,00
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.680.023.103,17	3.549.048.664,00	96,44	2.266.042.931,00
17.	Dinas Perhubungan	4.349.739.213,14	3.796.424.478,00	87,28	2.784.712.982,00
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.276.536.736,00	2.058.206.665,00	90,41	0,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.523.352.068,50	3.345.478.729,00	94,95	1.610.779.283,00
20.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	0,00	0,00	125.104.194,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.519.663.609,00	2.511.325.609,00	99,67	788.531.197,00
22.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.916.216.788,40	4.803.519.232,00	97,71	2.695.093.638,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016**

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.526.772.955,09	6.972.314.919,00	92,63	3.771.716.859,00
24.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	4.563.088.608,00
25.	Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	2.322.316.821,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	3.387.806.678,00
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.641.478.795,40	3.578.619.829,00	98,27	2.262.099.468,00
28.	DPRD	9.471.683.580,00	8.990.220.838,00	94,92	5.843.848.325,00
29.	KDH & WKDH	639.653.168,80	478.526.492,00	74,81	556.108.560,00
30.	Sekretariat Daerah	17.935.531.064,52	17.448.856.650,00	97,29	9.024.862.842,00
31.	Sekretariat DPRD	4.183.894.768,25	3.760.391.647,00	89,88	1.964.468.648,00
32.	Kecamatan Murung	5.803.218.659,70	4.856.890.744,00	83,69	3.947.592.250,00
33.	Kecamatan Tanah Siang	4.349.468.415,95	4.202.678.786,00	96,63	3.544.752.943,00
34.	Kecamatan Laung Tuhup	4.387.166.348,08	4.116.846.992,00	93,84	3.424.906.189,00
35.	Kecamatan Permata Intan	3.341.343.267,20	3.223.957.635,00	96,49	2.221.320.773,00
36.	Kecamatan Sumber Barito	2.632.596.414,93	2.608.283.754,00	99,08	2.192.925.340,00
37.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	2.452.862.232,00	2.363.930.346,00	96,37	1.493.886.807,00
38.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	2.215.128.001,93	1.761.128.345,00	79,50	1.338.228.291,00
39.	Kecamatan Sungai Babuat	2.017.389.301,00	1.824.140.231,00	90,42	1.283.650.633,00
40.	Kecamatan Uut Murung	1.649.082.005,00	1.225.655.569,00	74,32	1.047.246.901,00
41.	Kecamatan Seribu Riam	1.573.820.565,37	1.378.816.313,00	87,61	1.085.617.177,00
42.	Inspektorat	3.580.153.285,94	3.533.164.631,00	98,69	2.734.157.497,00
43.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.767.535.268,32	5.135.707.663,00	89,05	2.859.834.310,00
44.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.568.242.884,87	11.010.100.148,00	87,60	8.979.539.251,00
45.	Badan Pendapatan Daerah	5.169.451.828,45	4.803.406.544,00	92,92	3.323.832.804,00
46.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.996.601.600,00	2.805.822.662,00	93,63	2.466.683.331,00
	<b>Jumlah</b>	<b>449.755.056.302,67</b>	<b>429.347.960.577,00</b>	<b>95,46</b>	<b>373.157.294.378,00</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp197.051.298.065,84 dan Rp303.600.460.452,04 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.261.451.501,46	16.818.099.430,00	97,43	19.777.396.141,00
2.	Belanja Bahan/ Material	7.503.886.500,00	7.285.913.485,00	97,10	14.834.389.278,00
3.	Belanja Jasa Kantor	10.318.001.631,97	9.157.214.260,00	88,75	10.417.570.651,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.459.321.627,90	6.823.609.077,00	91,48	5.831.799.562,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.920.139.590,63	7.504.812.407,00	94,76	9.984.778.189,00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	678.027.500,00	628.687.500,00	92,72	621.339.000,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	491.000.000,00	482.500.000,00	98,27	948.800.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
8.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	145.600.000,00	137.100.000,00	94,16	28.600.000,00
10.	Belanja Makanan dan Minuman	9.338.256.100,96	8.879.573.534,00	95,09	9.663.672.525,00
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.165.233.000,00	1.158.886.000,00	99,46	2.392.928.300,00
12.	Belanja Pakaian Kerja	1.159.065.000,00	1.121.548.800,00	96,76	1.223.087.500,00
13.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.252.460.000,00	1.188.104.000,00	94,86	2.107.297.400,00
14.	Belanja Perjalanan Dinas	83.466.246.252,90	79.223.635.099,84	94,92	89.362.086.481,04
15.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	28.247.500,00
16.	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Belanja Pemeliharaan	6.236.354.947,00	5.763.655.090,00	92,42	6.252.178.193,00
18.	Belanja Jasa Konsultansi	3.660.179.000,00	2.778.215.500,00	75,90	4.120.896.600,00
19.	Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	44.000.000,00
20.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	590.000.000,00
21.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis PNS	2.619.011.000,00	2.417.932.293,00	92,32	6.256.025.466,00
22.	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.053.300.000,00	1.003.800.000,00	95,30	351.800.000,00
23.	Belanja Honorarium PNS	60.050.000,00	59.150.000,00	98,50	18.803.926.400,00
24.	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	57.833.142.720,00
25.	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.074.210.000,00	2.901.040.000,00	94,37	3.729.152.000,00
26.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	18.345.120.000,00	14.596.036.200,00	99,27	17.423.310.706,00
27.	Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN	2.171.758.929,60	2.033.508.024,00	93,63	2.164.852.151,00
28.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Selain Hibah/Bansos	50.000.000,00	49.464.000,00	98,93	2.137.482.000,00
29.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	65.000.000,00
30.	Belanja Jasa Layanan Kesehatan	1.735.950.000,00	1.077.716.260,00	62,08	0,00
31.	Belanja Transport /Akomodasi/ Uang Saku Peserta Pelatihan/ Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	2.333.650.100,00	2.123.359.810,00	90,99	1.364.534.596,00
32.	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD RSUD	23.269.400.000,00	20.916.387.296,00	89,89	9.242.423.893,00
33.	Belanja Dana Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	5.999.743.200,00
34.	Belanja Hadiah Perlombaan/Penghargaan	267.250.000,00	251.350.000,00	94,05	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>213.704.922.682,42</b>	<b>197.051.298.065,84</b>	<b>92,21</b>	<b>303.600.460.452,04</b>

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.538.782.700,00	24.267.464.719,00	82,15	40.582.777.474,00
2.	Dinas Kesehatan	22.535.790.879,01	19.277.755.506,00	85,54	23.004.116.320,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.320.919.624,28	5.175.272.483,00	97,26	10.856.118.991,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
4.	BLUD RSUD	23.269.400.000,00	20.916.387.296,00	89,89	9.242.423.893,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.840.161.189,60	5.178.395.703,00	88,67	12.619.510.050,66
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.439.560.000,00	2.113.394.640,00	86,63	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.347.576.639,00	2.259.540.363,00	96,25	3.068.590.098,38
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.054.556.940,00	1.028.956.356,00	97,57	3.549.330.064,00
9.	Dinas Sosial	2.731.550.000,00	2.687.474.531,00	98,39	5.077.149.581,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.172.220.000,00	2.121.808.149,24	97,68	0,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	2.761.665.794,00	2.705.674.422,00	97,97	2.740.117.543,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	3.687.545.300,00	3.669.897.447,50	99,52	8.128.154.881,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.334.744.674,05	2.285.508.513,00	97,89	3.300.136.221,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.847.913.778,72	2.834.453.417,00	99,53	4.920.114.026,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.610.157.381,17	5.447.193.341,00	97,10	7.719.033.601,00
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.268.048.305,00	3.232.008.053,00	98,90	4.865.187.716,00
17.	Dinas Perhubungan	2.271.798.056,00	2.152.847.630,00	94,76	5.872.432.888,00
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.381.869.760,00	1.354.498.062,00	98,02	0,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.742.908.514,76	2.400.446.474,00	87,51	1.923.306.532,00
20.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	0,00	0,00	310.494.134,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.748.583.766,37	1.721.493.974,00	98,45	2.402.618.328,00
22.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.692.528.744,91	4.594.099.625,00	97,90	7.383.626.172,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	4.710.570.478,16	4.657.187.484,00	98,87	7.818.753.440,00
24.	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	12.735.114.582,00
25.	Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	8.129.261.909,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	0,00	0,00	2.113.869.414,00
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.886.163.153,97	1.575.472.185,00	83,53	4.454.696.795,00
28.	Sekretariat Daerah	30.221.095.168,13	29.078.755.480,00	96,22	41.649.419.427,00
29.	Sekretariat DPRD	15.021.476.768,00	14.151.476.929,00	94,21	20.870.923.772,00
30.	Kecamatan Murung	2.771.819.789,51	2.730.777.100,00	98,52	3.711.356.647,00
31.	Kecamatan Tanah Siang	1.231.191.000,00	1.147.771.400,00	93,22	1.988.571.700,00
32.	Kecamatan Laung Tuhup	2.061.219.718,46	2.059.070.962,00	99,90	2.475.832.402,00
33.	Kecamatan Permata Intan	2.489.610.000,00	2.470.957.900,00	99,25	2.829.753.600,00
34.	Kecamatan Sumber Barito	1.171.235.000,00	1.167.222.311,00	99,66	1.278.151.766,00
35.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	644.463.151,29	636.339.275,00	98,74	1.286.466.620,00
36.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	1.406.950.000,00	1.300.678.200,00	92,45	1.534.936.700,00
37.	Kecamatan Sungai Babuat	705.723.494,17	704.146.132,00	99,78	1.270.282.700,00
38.	Kecamatan Uut Murung	1.367.744.233,72	1.311.056.102,00	95,86	1.271.020.900,00
39.	Kecamatan Seribu Riam	1.625.030.332,00	1.573.771.500,00	96,85	1.443.576.200,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
40.	Inspektorat	2.932.634.364,90	2.926.789.934,00	99,80	3.738.291.184,00
41.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.218.951.000,00	3.104.304.366,00	96,44	8.475.789.383,00
42.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.634.678.800,00	3.084.441.434,00	84,86	5.744.375.867,00
43.	Badan Pendapatan Daerah	2.743.034.981,50	2.703.542.485,00	98,56	6.125.146.746,00
44.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.263.049.201,74	3.242.966.182,10	99,38	5.089.630.184,00
	<b>Jumlah</b>	<b>213.704.922.682,42</b>	<b>197.051.298.065,84</b>	<b>92,21</b>	<b>303.600.460.452,04</b>

Realisasi Belanja Barang sebesar Rp197.051.298.065,84 termasuk didalamnya Belanja Barang dan Jasa (Dana BOS) sebesar Rp14.596.036.200,00 dan Belanja Barang dan Jasa (Dana JKN) sebesar Rp2.033.508.024,00.

**5.1.2.1.2.1. Belanja Barang dan Jasa (Dana BOS)**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2017 dan 2016 sebesar Rp14.596.036.200,00 dan 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang Sekolah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Belanja Barang Dana BOS - SD	12.405.120.000,00	9.857.983.500,00	79,47	0,00
2.	Belanja Barang Dana BOS - SMP	5.940.000.000,00	4.738.052.700,00	79,77	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.345.120.000,00</b>	<b>14.596.036.200,00</b>	<b>79,56</b>	<b>0,00</b>

**5.1.2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa (Dana JKN)**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari Dana JKN/FKTP pada Puskesmas Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.033.508.024,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang Sekolah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Puskesmas Puruk Cahu	602.424.420,00	587.365.060,00	97,50	0,00
2.	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	83.601.186,00	78.374.288,00	93,75	0,00
3.	Puskesmas Mangkahui	203.342.000,00	159.789.280,00	78,58	0,00
4.	Puskesmas Konut	72.886.000,00	67.721.320,00	92,91	0,00
5.	Puskesmas Saripoi	188.987.000,00	176.236.470,00	93,25	0,00
6.	Puskesmas Muara Laung	223.181.323,60	221.401.301,00	99,20	0,00
7.	Puskesmas Muara Tuhup	77.065.000,00	74.676.690,00	96,90	0,00
8.	Puskesmas Batu Bua	107.455.000,00	103.494.720,00	96,31	0,00
9.	Puskesmas Makunjung	41.389.000,00	31.056.220,00	75,03	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Lahung	280.261.000,00	256.510.725,00	91,53	0,00
11.	Puskesmas Tumbang Bantian	44.465.000,00	41.115.845,00	92,47	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Kunyi	94.230.000,00	90.280.815,00	95,81	0,00
13.	Puskesmas Muara Joloi	104.210.000,00	98.055.965,00	94,10	0,00
14.	Puskesmas Tumbang Olong	48.262.000,00	47.429.325,00	98,27	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.171.758.929,60</b>	<b>2.033.508.024,00</b>	<b>93,63</b>	<b>0,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SOPD Tahun Anggaran 2017 ditambah dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2017 serta ditambah dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa JKN jumlahnya menjadi Rp197.051.298.065,84.

**5.1.2.1.3. Belanja Subsidi**

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp19.363.486.346,00 dan Rp7.795.168.259,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	Subsidi untuk PDAM	750.000.000,00	749.482.325,00	99,93	999.936.159,00
2.	Subsidi Pelayanan Kesehatan/Kartu Mura Sehat (KMS)	19.192.094.922,00	18.614.004.039,00	96,99	6.795.232.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.942.094.922,00</b>	<b>19.363.486.364,00</b>	<b>97,10</b>	<b>7.795.168.259,00</b>

**5.1.2.1.4. Belanja Hibah**

Belanja Hibah merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp69.258.894.013,00 dan Rp120.328.651.344,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	35.863.832.139,50	35.001.016.513,00	97,59	103.365.796.344,00
2.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	34.999.967.500,00	34.257.877.500,00	97,88	16.962.855.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.863.799.639,50</b>	<b>69.258.894.013,00</b>	<b>97,74</b>	<b>120.328.651.344,00</b>

**5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga, bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.780.832.300,00 dan Rp4.248.360.000,00.

Belanja Bantuan Sosial diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**5.1.2.2. Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp219.839.334.350,25 dan Rp388.512.881.911,00.

**5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.819.357.500,00 dan Rp3.912.479.500,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp20.715.659.337,00 dan Rp31.873.870.590,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	163.050.000,00	128.973.000,00	79,10	844.540.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.751.224.553,00	4.392.263.762,00	92,44	10.626.105.886,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	307.000.000,00	297.142.000,00	96,79	457.110.000,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	205.000.000,00	204.390.000,00	99,70	79.375.000,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	85.000.000,00	81.035.000,00	95,34	52.500.000,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	650.000.000,00	647.000.000,00	99,53	0,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	217.681.900,00	212.196.900,00	97,48	0,00
11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	1.248.451.180,00	1.198.401.894,00	95,99	2.327.173.028,00
12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.943.485.766,00	5.711.690.466,00	96,10	7.610.494.850,00
13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.895.601.510,00	3.250.480.345,00	66,40	4.188.369.062,00
14.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	372.629.000,00	371.419.000,00	99,68	453.331.500,00
15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	348.902.300,00	290.751.000,00	83,33	893.204.224,00
16.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	306.994.000,00	296.575.000,00	96,61	60.280.000,00
17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	60.000.000,00	59.750.000,00	99,58	69.475.000,00
18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	361.000.000,00	351.846.011,00	97,46	695.969.974,00
19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.943.991.824,00	2.821.465.659,00	95,84	1.672.692.566,00
20.	Belanja Modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	168.000.000,00
21.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	782.000.000,00	149.408.300,00	19,11	466.700.000,00
22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5.000.000,00	4.998.500,00	99,97	0,00
23.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Belanja Modal Pengadaan	0,00	0,00	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
	Persenjataan Non Senjata Api				
25.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	251.779.400,00	243.872.500,00	96,86	199.500.000,00
26.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer - Dana BOS	0,00	0,00	0,00	997.599.500,00
27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi - Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.900.791.433,00</b>	<b>20.715.659.337,00</b>	<b>86,67</b>	<b>31.873.870.590,00</b>

**5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp70.560.938.042,75 dan Rp88.539.938.119,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.188.557.690,00	59.097.787.042,75	92,07	71.624.369.781,00
2.	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.434.448.500,00	10.506.021.000,00	72,78	15.601.010.838,00
3.	Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	13.267.500,00
5.	Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	0,00	0,00	0,00	751.120.000,00
6.	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	49.830.000,00	99,66	39.750.000,00
7.	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	908.800.000,00	907.300.000,00	99,83	510.420.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>79.581.806.190,00</b>	<b>70.560.938.042,75</b>	<b>88,66</b>	<b>88.539.938.119,00</b>

Dari belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp70.560.938.042,75 terdapat pekerjaan yang jaminan pemeliharaannya belum jatuh tempo per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SOPD	Jumlah Pekerjaan Paket	Nominal (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	9	261.999.100,00
2.	RSUD	4	192.195.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	371.800.242,44
4.	Sekretariat Daerah	5	32.740.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>858.734.342,44</b>

**5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp123.225.737.584,50 dan Rp261.851.527.972,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan	112.114.710.132,86	108.647.490.299,50	96,91	216.807.675.982,00
2.	Belanja Modal Pengadaan	6.545.177.090,00	5.832.067.540,00	89,10	10.539.385.260,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
	Jembatan				
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.137.668.500,00	3.129.407.500,00	99,74	1.148.980.250,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	268.230.000,00	163.095.000,00	60,80	3.317.670.000,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	140.489.000,00	139.666.000,00	99,41	729.795.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	135.956.000,00	43.232.120,00	31,80	0,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	475.264.500,00	463.834.500,00	97,60	2.582.054.500,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	34.908.500,00	34.908.500,00	100,00	0,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	6.009.670.075,00	2.337.784.075,00	38,90	3.843.556.425,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	80.000.000,00	79.900.000,00	99,88	0,00
11.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	135.755.000,00	135.705.000,00	99,96	2.739.748.900,00
12.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	128.000.000,00	124.539.000,00	97,30	257.089.000,00
13.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum	2.133.225.400,00	1.877.030.050,00	87,99	8.867.758.450,00
14.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	195.500.000,00	181.078.000,00	92,62	10.948.014.205,00
15.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00
16.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas	36.085.452,00	36.000.000,00	99,76	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.570.639.649,86</b>	<b>123.225.737.584,50</b>	<b>93,66</b>	<b>261.851.527.972,00</b>

Dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp123.225.737.584,50 terdapat pekerjaan yang jaminan pemeliharannya belum jatuh tempo per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama SOPD	Jumlah Pekerjaan Paket	Nominal (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91	948.479.345,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	36	326.927.138,00
	<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>1.275.406.483,00</b>

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.292.856.886,00 dan Rp2.231.227.730,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Belanja Modal Pengadaan Buku	1.109.658.300,00	1.069.006.886,00	96,34	516.660.400,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	595.537.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	74.750.000,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	203.550.000,00	199.050.000,00	97,80	418.374.000,00
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Buku dan Perpustakaan - Dana BOS	0,00	0,00	0,00	600.106.330,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.338.208.300,00</b>	<b>1.292.856.886,00</b>	<b>96,61</b>	<b>2.231.227.730,00</b>

**5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya**

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp224.785.000,00 dan Rp103.838.000,00.

**5.1.2.3. Belanja Tak Terduga**

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 dan Rp587.982.250,00.

**5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam dan bencana sosial. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 dan Rp587.982.250,00.

**5.1.3. Transfer**

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp180.744.778.996,00 dan Rp107.399.490.844,00.

**5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer bagi hasil pajak daerah. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp796.050.000,00 dan Rp757.500.000,00.

**5.1.3.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp487.350.000,00 dan Rp757.500.000,00.

**5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan bagi hasil pendapatan lainnya kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp308.700.000,00 dan Rp0,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi, Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp179.948.728.996,00 dan Rp106.641.990.844,00.

**5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp245.000.000,00 dan Rp1.622.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Bantuan Penerbangan Palangka Raya - Puruk Cahu PP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Biaya sewa Satelit TVRI Kalteng	445.000.000,00	245.000.000,00	55,06	245.000.000,00
3.	Biaya Kontribusi MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
4.	Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur	0,00	0,00	0,00	1.177.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>245.000.000,00</b>	<b>55,06</b>	<b>1.622.500.000,00</b>

**5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp178.907.206.100,00 dan Rp104.273.838.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Penyaluran Dana ADD	82.978.113.100,00	82.978.113.100,00	100,00	11.711.000.000,00
2.	Alokasi Dana Desa dan Desa Adat	95.929.093.000,00	95.929.093.000,00	100,00	74.845.438.000,00
3.	Tunjangan Aparat Desa dan BPD	0,00	0,00	0,00	17.717.400.000,00
4.	Pendampingan Gerbang Desamu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>178.907.206.100,00</b>	<b>178.907.206.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104.273.838.000,00</b>

**5.1.3.2.3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp796.522.896,00 dan Rp745.652.844,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	266.437.413,00	266.437.413,00	100,00	266.437.413,00
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	62.137.737,00	62.137.737,00	100,00	62.137.737,00
3.	Partai Golongan Karya	62.626.266,00	62.626.266,00	100,00	62.626.266,00
4.	Partai Keadilan Sejahtera	65.289.537,00	65.289.537,00	100,00	65.289.537,00
5.	Partai Amanat Nasional	71.671.932,00	71.671.932,00	100,00	71.671.932,00
6.	Partai Demokrat	56.622.087,00	56.622.087,00	100,00	56.622.087,00
7.	Partai Nasional Demokrat	84.893.733,00	84.893.733,00	100,00	84.893.733,00
8.	Partai Persatuan Pembangunan	75.974.139,00	75.974.139,00	100,00	75.974.139,00



## Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	50.870.052,00	50.870.052,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>796.522.896,00</b>	<b>796.522.896,00</b>	<b>100,00</b>	<b>745.652.844,00</b>

### **5.1.4. Pembiayaan Neto**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dengan tujuan untuk menutup antara selisih antara pendapatan dan belanja, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp86.903.877.640,16 dan Rp203.753.598.712,06.

#### **5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan merupakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.153.877.640,16 dan Rp209.003.598.712,06.

##### **5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA Tahun Lalu**

Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Lalu untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.153.877.640,16 dan Rp209.003.598.712,06.

#### **5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.250.000.000,00 dan Rp5.250.000.000,00.

##### **5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.250.000.000,00 dan Rp5.250.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1.	PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	100,00	5.250.000.000,00
2.	PD Petak Malai Buluh Merindu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.250.000.000,00</b>	<b>6.250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.250.000.000,00</b>

## **5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

### **5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (Awal)**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.153.877.640,16 dan Rp209.003.598.712,06.

### **5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp93.153.877.640,16 dan Rp209.003.598.712,06.

**5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp126.241.487.441,37 dan Rp93.153.877.640,16.

**5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp126.241.487.441,37 dan Rp93.153.877.640,16.

**5.3. PENJELASAN NERACA**

**5.3.1. Aset**

Jumlah aset per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.876.959.207.622,97 dan Rp2.742.084.302.205,51.

**5.3.1.1. Aset Lancar**

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp196.415.643.359,39 dan Rp184.896.367.444,38.

**5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah merupakan Kas dan Setara Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tanggal Neraca. Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp120.890.267.390,37 dan Rp92.015.621.991,82 dengan rincian sebagai berikut.

No	No Rekening	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	501-001-086-3	KAS DAERAH KAB. MURA (DDL)	19.328.341.373,96	34.660.283.576,32
2.	501-001-112-6	KAS UMU DAERAH KAB. MURA	93.410.310.179,13	49.203.722.578,22
3.	501-001-114-2	BEND. DAK.DIR.TA.2002	5.439.203.236,60	5.439.203.236,60
4.	501-001-004-9	DAK NON DR BID.PRASARANA PEMDA	63.982.045,00	63.982.045,00
5.	501-001-005-7	DAK NON DR BIDANG INFRASTRUKTUR	2.142.778.639,18	2.142.778.639,18
6.	501-001-006-5	DAK NON DR BID.PERTANIAN	7.482.199,50	7.482.199,50
7.	501-001-007-3	DAK NON DR BID. PENDIDIKAN	0,00	0,00
8.	501-001-008-1	DAK NON DR BID. KESEHATAN	335.198.953,00	335.198.953,00
9.	501-001-009-0	DAK NON DR BID. KELAUTAN & PERIKANAN	7.600.800,00	7.600.800,00
10.	501-001-010-3	DAK NON DR BID.LINGKUNGAN HIDUP	1.164.462,00	1.164.462,00
11.	501-001-113-4	DAK NON DIR KAB. MURA	154.205.502,00	154.205.502,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>120.890.267.390,37</b>	<b>92.015.621.991,82</b>

Terdapat selisih pencatatan antara Kuasa BUD dengan rekening koran pada PT Bank Pembangunan Kalteng, dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	No Rekening	Uraian	Bank (Rp)	BUD (Rp)
1.	501-001-086-3	KAS DAERAH KAB. MURA (DDL)	19.328.314.255,96	19.328.341.373,96
2.	501-001-112-6	KA UMU DAERAH KAB. MURA	93.410.310.179,13	93.410.310.179,13
3.	501-001-114-2	BEND. DAK.DIR.TA.2002	5.439.203.236,60	5.439.203.236,60
4.	501-001-004-9	DAK NON DR BID.PRASARANA PEMDA	63.982.045,00	63.982.045,00
5.	501-001-005-7	DAK NON DR BIDANG INFRASTRUKTUR	2.142.778.639,18	2.142.778.639,18
6.	501-001-006-5	DAK NON DR BID.PERTANIAN	7.482.199,50	7.482.199,50
7.	501-001-007-3	DAK NON DR BID. PENDIDIKAN	0,00	0,00
8.	501-001-008-1	DAK NON DR BID. KESEHATAN	335.198.953,00	335.198.953,00
9.	501-001-009-0	DAK NON DR BID. KELAUTAN & PERIKANAN	7.600.800,00	7.600.800,00
10.	501-001-010-3	DAK NON DR BID.LINGKUNGAN HIDUP	1.164.462,00	1.164.462,00
11.	501-001-113-4	DAK NON DIR KAB. MURA	154.205.502,00	154.205.502,00
			<b>120.890.240.272,37</b>	<b>120.890.267.390,37</b>

Selisih sebesar Rp27.118,-, pada Rekening Kas Daerah Kab. Mura (501-001-086-3), dikarenakan hal berikut.

- Pendebetan atas potongan pajak PPh Pasal 23 dari jasa giro dan jasa tabungan yang bukan merupakan objek PPh pasal 23 pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp 13.418,-;
- Pendebetan atas potongan pajak PPh Pasal 23 dari jasa giro dan jasa tabungan yang bukan merupakan objek PPh pasal 23 pada bulan Desember 2017 sebesar Rp 13.700,-;
- Atas selisih sebesar Rp27.118,- tersebut telah dilakukan koreksi ke Kas Daerah Kab. Mura pada tanggal 10 Januari 2018.

**5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Tidak ada kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017.

**5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017.

**5.3.1.1.4. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN**

Jumlah Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.327.311.819,20 dan Rp1.898.818.835,20. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing puskesmas sebesar Rp2.327.311.819,20 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Puruk Cahu	411.039.505,80	688.643.400,00	614.022.060,00	485.660.845,80
2.	P. Cahu Seberang	60.326.110,40	94.323.550,00	80.904.288,00	73.745.372,40
3.	Saripoi	160.887.053,80	209.536.500,00	177.026.470,00	193.397.083,80
4.	Batu Bua	94.099.734,40	127.161.000,00	103.494.720,00	117.766.014,40
5.	Tumbang Bantian	31.881.841,60	55.023.000,00	41.115.845,00	45.788.996,60
6.	Muara Laung	242.884.670,00	281.005.758,00	233.051.301,00	290.839.127,00
7.	Muara Tuhup	41.220.847,00	88.735.300,00	80.426.690,00	49.529.457,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal (Rp)	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
8.	Tumbang Olong	70.609.758,60	67.594.500,00	50.729.325,00	87.474.933,60
9.	Mangkahui	168.566.140,60	214.795.500,00	171.459.280,00	211.902.360,60
10.	Makunjung	36.807.295,00	50.403.000,00	33.506.220,00	53.704.075,00
11.	Tumbang Kunyi	167.784.095,60	144.928.500,00	110.230.815,00	202.481.780,60
12.	Tumbang Lahung	227.804.695,20	312.109.500,00	256.810.725,00	283.103.470,20
13.	Konut	77.187.242,00	106.724.000,00	73.721.320,00	110.189.922,00
14.	Muara Joloi	107.719.845,20	114.064.500,00	100.055.965,00	121.728.380,20
<b>Jumlah</b>		<b>1.898.818.835,20</b>	<b>2.555.048.008,00</b>	<b>2.126.555.024,00</b>	<b>2.327.311.819,20</b>

**5.3.1.1.5. Kas di Bendahara Dana BOS**

Pada Tahun 2016 Saldo Akhir Dana BOS per 31 Desember 2016 adalah Rp567.090.896,79 tetapi saldo tersebut termasuk saldo kas di bendahara BOS untuk SMA dan SMK dan sekolah swasta, dan untuk saldo awal BOS sekolah SDN dan SMPN juga dikoreksi karena untuk biaya administrasi bank dan potongan bank belum diperhitungkan, sehingga pada awal tahun 2017 dilakukan koreksi saldo awal Dana BOS dengan rincian adalah sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal (Audited)	567.090.896,79
Koreksi Pencatatan:	
SDN	45.388.394,85
SMPN	186.597.742,42
Sekolah Swasta	23.559.990,40
SLB	156.043,14
SMAN	210.220.000,00
SMKN	270.000,00
<b>Saldo Awal (Koreksi)</b>	<b>100.898.725,98</b>

Jumlah Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp168.902.525,98 dan Rp100.898.725,98 setelah koreksi. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp168.902.525,98 yang berasal dari penerimaan setelah dikurangi belanja dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang Sekolah	Saldo awal	Jumlah Dana Yang Tersalur	Belanja Barang dan Jasa	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3+4-5)
1.	SD	94.013.479,55	9.921.640.000,00	9.857.983.500,00	157.669.979,55
2.	SMP	6.885.246,43	4.742.400.000,00	4.738.052.700,00	11.232.546,43
<b>Jumlah</b>		<b>100.898.725,98</b>	<b>14.664.040.000,00</b>	<b>14.596.036.200,00</b>	<b>168.902.525,98</b>

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp168.902.525,98 belum termasuk pendapatan bunga bank dan biaya administrasi bank.

**5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BLUD**

Jumlah Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.756.564.118,00 dan Rp37.659.518,00. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Desember 2017 sebesar Rp3.756.564.118,00 yang berasal dari penerimaan pendapatan Tahun 2017 setelah dikurangi belanja dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Saldo awal di Bendahara BLUD	0,00	37.659.518,00	
2.	Pendapatan BLUD RSUD	25.000.000.000,00	26.184.211.896,00	104,74
3.	Belanja Pegawai BLUD RSUD	1.730.600.000,00	1.548.920.000,00	89,50
4.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	23.269.400.000,00	20.916.387.296,00	89,89
	<b>Saldo Kas akhir di Bendahara BLUD (1+2-3-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.564.118,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.1.1.7. Piutang Pendapatan**

Piutang Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Murung Raya terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.087.259.686,54 dan Rp14.338.840.943,78 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	207.587.419,00	140.873.933,00
2.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	60.780.000,00	60.780.000,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.582.360.952,88	2.403.205.435,88
4.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.495.793.459,00
5.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	123.884.600,00	0,00
6.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	282.388.200,00	149.488.200,00
7.	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	135.667.200,00
8.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	0,00
8.	Piutang BLUD	2.553.091.000,00	0,00
9.	Piutang Bagi Hasil Pajak	114.768.169,00	114.768.169,00
10.	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.399.159.345,66	9.246.014.546,90
11.	Piutang Pendapatan Lainnya – BOS	3.713.240.000,00	592.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.087.259.686,54</b>	<b>14.338.840.943,78</b>

**Piutang Pajak Penerangan Jalan**

Merupakan hak terhadap penerimaan kas atas Pajak Penerangan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	140.873.933,00	125.210.859,00
2.	Pendapatan – LO	2.123.306.946,00	1.531.154.363,00
3.	Pendapatan – LRA	(2.056.593.460,00)	(1.515.491.289,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>207.587.419,00</b>	<b>140.873.933,00</b>

**Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Merupakan hak atas penerimaan kas atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	60.780.000,00	60.780.000,00
2.	Pendapatan – LO	1.298.450,00	55.729.105,00
3.	Pendapatan – LRA	(1.298.450,00)	(55.729.105,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>60.780.000,00</b>	<b>60.780.000,00</b>

**Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Merupakan hak atas penerimaan kas atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah, termasuk piutang yang diserahkan dari Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	2.403.205.435,88	2.131.777.774,88
2.	Penghapusan Piutang	(822.361.749,00)	0,00
3.	Pendapatan – LO	1.370.033.849,00	1.316.794.748,00
4.	Pendapatan – LRA	(368.516.583,00)	(1.045.367.087,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.582.360.952,88</b>	<b>2.403.205.435,88</b>

Adapun rincian laporan PBB-P2 dari awal penyerahan pusat ke daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Saldo Awal Pelimpahan / Ketetapan	Cetak Masal SPPT	SPPT PBB –P2 Tertagih	Penghapusan Piutang PBB – P2	Saldo Piutang
1	2013	1.521.285.901,00	-	-	-	1.521.285.901,00
2	2014	-	1.067.420.109,00	194.498.123,00	-	2.394.207.887,00
3	2015	-	1.067.420.109,00	1.329.850.221,12	-	2.131.777.774,88
4	2016	-	1.316.794.748,00	1.045.367.087,00	-	2.403.205.435,88
5	2017	-	1.370.030.849,00	368.513.583,00	822.361.749,00	2.582.360.952,88

Penghapusan piutang sebesar Rp822.361.749,00 sesuai dengan SK Bupati Murung Raya Nomor:188.45/287/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp590.871.281,00 dan SK Bupati Murung Raya Tahun Nomor:188.45/348/217 tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp240.415.750,00.

**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.495.793.459,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD RSUD.

**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	10.506.159,00	11.395.000,00
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang	0,00	188.364.000,00
3.	Pendapatan – LO	715.811.196,00	595.775.708,00
4.	Pendapatan – LRA	(726.317.355,00)	(785.028.549,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506.159,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.506.159,00 merupakan klaim RITP Puskesmas Batu Bua, Puruk Cahu, Tumbang Olong, Konut, Muara Laung dan Muara Tuhup dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2017.

**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	168.759.900,00	856.326.000,00
2.	Koreksi Saldo Awal	0,00	168.759.900,00
3.	Pendapatan – LO	440.039.031,00	0,00
4.	Pendapatan – LRA	(608.798.931,00)	(856.326.000,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>0,00</b>	<b>168.759.900,00</b>

Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp856.326.000,00 merupakan saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2015 yang ada pada RSUD dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 April 2016.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp168.759.900,00, merupakan Klaim Bulan Oktober dan Nopember 2015 dari BPJS Kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 25 Januari 2017.

**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - BLUD RSUD**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD per 31 Desember 2016 di reklasifikasi sebesar Rp1.316.527.400,00 ke Piutang BLUD.

**Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan reklasifikasi dari Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Disperindakop-UKM**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	0,00	0,00
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang (Reklasifikasi)	135.667.200,00	0,00
3.	Koreksi Saldo Awal Piutang	(780.800,00)	
4.	Pendapatan – LO	318.503.800,00	0,00
5.	Pendapatan – LRA	(329.505.600,00)	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>123.884.600,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2017 yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp123.884.600,00 merupakan koreksi reklasifikasi saldo awal dari piutang retribusi pasar grosir dan/ pertokoan sebesar Rp135.667.200,00 yang dikoreksi sebesar Rp780.800,00 dan pendapatan LRA selama tahun 2017 Rp329.505.600,00 dan pendapatan LO pada tahun 2017 sebesar Rp318.503.800,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

**Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp282.388.200,00 dan Rp149.488.200,00. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah.

**Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	112.918.200,00	142.918.200,00
2.	Pendapatan – LO	534.350.000,00	494.850.000,00
3.	Pendapatan – LRA	(379.850.000,00)	(524.850.000,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>267.418.200,00</b>	<b>112.918.200,00</b>

Saldo piutang retribusi sewa alat berat per 31 Desember 2017 yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp267.418.200,00 adalah pendapatan LRA selama tahun 2017 sebesar Rp379.850.000,00 dan Pendapatan LO sebesar Rp534.350.000,00.

**Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Pendapatan Daerah**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	36.570.000,00	28.370.000,00
2.	Pendapatan – LO	233.800.000,00	236.820.000,00
3.	Pendapatan – LRA	(255.400.000,00)	(228.620.000,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>14.970.000,00</b>	<b>36.570.000,00</b>

Saldo piutang retribusi pemakaian rumah dinas per 31 Desember 2017 yang ada pada Dinas Pendapatan sebesar Rp14.970.000,00, pendapatan LRA selama tahun 2017 sebesar Rp255.400.000,00 dan pendapatan LO pada tahun 2017 sebesar Rp233.800.000,00.

**Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Tahun 2016 sebesar Rp135.667.200,00 di reklasifikasi ke Piutang Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	135.667.200,00	46.009.600,00
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang	(135.667.200,00)	0,00
3.	Pendapatan – LO	0,00	226.222.800,00
4.	Pendapatan – LRA	0,00	(136.565.200,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>0,00</b>	<b>135.667.200,00</b>

**Piutang Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga**

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00 merupakan retribusi penggunaan Gedung Bulutangkis Tumenggung Silam yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda, dan Olahraga.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	0,00	0,00
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
3.	Pendapatan – LO	50.000.000,00	0,00
4.	Pendapatan – LRA	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Piutang BLUD**

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp1.316.527.400,00 di reklasifikasi ke Piutang BLUD karena merupakan piutang atas tagihan pelayanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada BLUD.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	0,00	0,00
2.	Koreksi Saldo Awal Piutang	1.316.527.400,00	0,00
3.	Pendapatan – LO	27.420.775.496,00	0,00
4.	Pendapatan – LRA	(26.184.211.896,00)	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>2.553.091.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Piutang Bagi Hasil Pajak**

Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp114.768.169,00, terdiri dari piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp15.477.428,00 yang berdasarkan PMK.167/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013. Dan Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp99.290.741,00 yang berdasarkan PMK.230/PMK.07/2013 tanggal 26 Desember 2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011.

**Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pencatatan Nilai Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke dalam Neraca per 31 Desember 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2013. Dimana sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan tersebut masih belum disalurkan. Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp15.477.428,00 dan Rp15.477.428,00.

**Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau**

Pencatatan Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam Cukai Hasil Tembakau (CHT) ke dalam Neraca 2013 sampai dengan 2017 berdasarkan PMK 230/PMK.07/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011. Dan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Dana Bagi Hasil Tembakau masih belum disalurkan. Piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp99.290.741,00 dan Rp99.290.741,00.

**Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	9.246.014.546,90	11.993.647.951,18
2.	Pendapatan – LO	26.589.325.636,01	23.283.766.317,38



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
3.	Pendapatan – LRA	(30.436.180.837,25)	(26.031.399.721,66)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>5.399.159.345,66</b>	<b>9.246.014.546,90</b>

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/20/2018 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Salur Tahun Anggaran 2017 Kepada Kabupaten/kota Se Kalimantan Tengah Pada Tahun Anggaran 2018.

**Piutang Pendapatan Lainnya - BOS**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	592.250.000,00	0,00
2.	Koreksi saldo awal piutang BOS	(34.000.000,00)	0,00
2.	Pembayaran	558.250.000,00	0,00
3.	Penambahan	3.713.240.000,00	592.250.000,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.713.240.000,00</b>	<b>592.250.000,00</b>

Saldo awal piutang pendapatan lainnya - BOS 2016 dikoreksi sebesar Rp34.000.000,00 karena merupakan piutang kurang salur BOS untuk sekolah swasta yaitu SMP Muhammadiyah Puruk Cahu, yang tidak berada dibawah Entitas Pemerintah Daerah. Saldo Piutang BOS per 31 Desember 2017 Rp3.713.240.000,00 merupakan piutang pendapatan yang bersumber dari dana BOS TW IV untuk SDN dan SMPN yang belum disalurkan.

**5.3.1.1.8. Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya merupakan piutang dari PT Taspen (Persero), PD PMBM dan PT Aviastar Mandiri. Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp694.847.622,00 dan Rp721.724.014,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	PT Taspen (Persero)	230.928.900,00	257.805.292,00
2.	PD PMBM	320.268.000,00	320.268.000,00
3.	PT Aviastar Mandiri	143.650.722,00	143.650.722,00
	<b>Jumlah</b>	<b>694.847.622,00</b>	<b>721.724.014,00</b>

**Piutang PT Taspen (Persero)**

Piutang PT Taspen (Persero) merupakan gaji PNS yang telah memasuki Batas Usai Pensiun (BUP) tetapi masih dibayarkan karena SK penetapan pensiun dari Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar penerbitan SKPP belum terbit. Atas gaji yang tetap dibayarkan tersebut akan diperhitungkan (terhutang) pada saat penerbitan SKPP dan kelebihan pembayaran tersebut akan dipotong melalui pembayaran gaji pensiun oleh PT Taspen (Persero) yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	257.805.292,00	259.855.292,00
2.	Pendapatan – LO	98.118.674,00	96.479.276,00
3.	Pendapatan – LRA	(124.995.066,00)	(98.529.276,00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>230.928.900,00</b>	<b>257.805.292,00</b>

**Piutang PD Petak Malai Buluh Merindu (PD PMBM)**

Piutang kepada PD PMBM merupakan hasil penjualan tiket Pesawat rute Puruk Cahu yang dikelola oleh PD PMBM, dan sampai dengan saat ini belum dibayarkan sehingga per tanggal neraca 31 Desember 2017 sebesar Rp320.268.000,00.

**Piutang Kepada PT Aviastar Mandiri**

Piutang kepada PT Aviastar Mandiri merupakan dari tahun 2015, dan sampai dengan saat ini belum dibayarkan sebesar Rp143.650.722,00

**5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang**

Penyisihan piutang dibentuk untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing (Rp1.377.942.745,72) dan (Rp1.245.160.763,12), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(1.177.177.041,52)	(1.245.160.763,12)
2.	Penyisihan Piutang Lainnya	(200.765.704,20)	(0,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(1.377.942.745,72)</b>	<b>(1.245.160.763,12)</b>

**Penyisihan Piutang Pendapatan**

Penyisihan Piutang Pendapatan disajikan sebesar (Rp1.177.177.041,52) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	207.587.419,00	(1.037.937,10)
2.	Piutang PBB - P2	2.582.360.952,88	(887.654.189,19)
3.	Piutang Pajak Mineral dan Batuan	60.780.000,00	(55.390.000,00)
4.	Piutang Retribusi Alat Berat	267.418.200,00	(113.690.700,00)
5.	Piutang Retribusi Pemakaian Rumah Dinas	14.970.000,00	(1.800.600,00)
6.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	123.884.600,00	(1.642.079,00)
7.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	(250.000,00)
8.	Piutang BLUD	2.553.091.000,00	(12.765.455,00)
9.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan	15.477.428,00	(7.738.714,00)
10.	Piutang Bagi SDA Cukai Hasil Tembakau	99.290.741,00	(49.645.370,50)
11.	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.399.159.345,66	(26.995.796,73)
12.	Piutang Pendapatan Lainnya – BOS	3.713.240.000,00	(18.566.200,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>15.087.259.686,54</b>	<b>(1.177.177.041,52)</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

**Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	207.587.419,00	(1.037.937,10)
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>207.587.419,00</b>	<b>(1.037.937,10)</b>

**Penyisihan Piutang PBB - P2**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	1.131.427.370,00	(5.657.136,85)
2.	1 -2 Tahun	10%	543.276.724,00	(54.327.672,40)
3.	3 - 5 Tahun	50%	159.974.957,88	(79.987.478,94)
4.	> 5 Tahun	100%	747.681.901,00	(747.681.901,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>2.582.360.952,88</b>	<b>(887.654.189,19)</b>

Berdasarkan SK Bupati Murung Raya Nomor:188.45/287/2017 tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp590.871.281,00 dan SK Bupati Murung Raya Tahun Nomor:188.45/348/217 tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp240.415.750,00, sehingga ada penghapusan penyisihan piutang sebesar Rp651.659.426,24.

**Penyisihan Piutang Pajak Mineral dan Batuan**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	0,00	0,00
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	10.780.000,00	(5.390.000,00)
4.	> 5 Tahun	100%	50.000.000,00	(50.000.000,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>60.780.000,00</b>	<b>(55.390.000,00)</b>

**Penyisihan Piutang Retribusi Alat Berat**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	154.500.000,00	772.500,00
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	112.918.200,00	(112.918.200,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>267.418.200,00</b>	<b>(113.690.700,00)</b>

**Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Rumah Dinas**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	7.320.000,00	(36.600,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	5.340.000,00	(534.000,00)
3.	3 - 5 Tahun	50%	2.160.000,00	(1.080.000,00)
4.	> 5 Tahun	100%	150.000,00	(150.000,00)
	<b>Jumlah</b>		<b>14.970.000,00</b>	<b>(1.800.600,00)</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	113.119.800,00	(565.599,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	10.764.800,00	(1.076.480,00)
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>123.884.600,00</b>	<b>(1.642.079,00)</b>

**Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	50.000.000,00	(250.000,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>50.000.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>

**Penyisihan Piutang BLUD**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	2.553.091.000,00	(12.765.455,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>2.553.091.000,00</b>	<b>(12.765.455,00)</b>

**Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	0,00	0,00
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	15.477.428,00	(7.738.714,00)
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>15.477.428,00</b>	<b>(7.738.714,00)</b>

**Penyisihan Piutang Bagi SDA Cukai Hasil Tembakau**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	0,00	0,00
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	99.290.741,00	(49.645.370,50)
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>99.290.741,00</b>	<b>(49.645.370,50)</b>

**Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	5.399.159.345,66	(26.995.796,73)
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>5.399.159.345,66</b>	<b>(26.995.796,73)</b>

**Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya – BOS**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	3.713.240.000,00	(18.566.200,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>3.713.240.000,00</b>	<b>(18.566.200,00)</b>

**Penyisihan Piutang Lainnya**

Penyisihan Piutang Lainnya disajikan sebesar (Rp200.765.704,20) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.	Piutang Taspen	230.928.900,00	(26.266.632,00)
2.	Piutang PMBM	320.268.000,00	(160.134.000,00)
3.	Piutang PT Aviastar	143.650.722,00	(14.365.072,20)
Jumlah		<b>694.847.622,00</b>	<b>(200.765.704,20)</b>

**Penyisihan Piutang TASPEN**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	28.276.400,00	(141.382,00)
2.	1 -2 Tahun	10%	188.002.500,00	(18.800.250,00)
3.	3 - 5 Tahun	50%	14.650.000	(7.325.000,00)
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>230.928.900,00</b>	<b>(26.266.632,00)</b>

**Penyisihan Piutang PMBM**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	0,00	0,00
2.	1 -2 Tahun	10%	0,00	0,00
3.	3 - 5 Tahun	50%	320.268.000,00	(160.134.000,00)
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>320.268.000,00</b>	<b>(160.134.000,00)</b>

**Penyisihan Piutang PT.AVIASTAR**

No	Umur Piutang	%	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	<1 Tahun	0,5%	0,00	0,00
2.	1 -2 Tahun	10%	143.650.722,00	14.365.072,20
3.	3 - 5 Tahun	50%	0,00	0,00
4.	> 5 Tahun	100%	0,00	0,00
Jumlah			<b>143.650.722,00</b>	<b>(14.365.072,20)</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2017 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2017 dan masih memiliki manfaat. Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp125.446.016,00 dan Rp135.990.410,00. Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.111.904,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	10.623.929,00	1.124.176,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	12.251.934,00	9.922.283,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.514.988,00	15.386.613,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	0,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.827.521,00	1.759.872,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.459.438,00	2.331.359,00
8.	Dinas Sosial	128.934,00	261.773,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.245.380,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	3.033.002,00	2.786.434,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	3.997.372,00	0,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.923.579,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.468.751,00	0,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.141.770,00	757.904,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.710.363,00	264.573,00
16.	Dinas Perhubungan	5.915.108,00	6.540.232,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.594.815,00	2.765.197,00
19.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	0,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.759.003,00	1.776.643,00
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	179.502,00	823.435,00
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan	982.549,00	2.402.745,00
23.	Dinas Kehutanan	0,00	745.531,00
24.	Dinas Perkebunan	0,00	2.612.920,00
25.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	7.659.878,00
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	3.855.960,00
27.	Sekretariat Daerah	28.516.303,00	32.499.799,00
28.	Sekretariat DPRD	787.705,00	5.793.638,00
29.	Kecamatan Murung	1.948.948,00	7.015.208,00
30.	Kecamatan Tanah Siang	0,00	1.111.289,00
31.	Kecamatan Laung Tuhup	2.730.138,00	2.676.405,00
32.	Kecamatan Permata Intan	401.683,00	801.874,00
33.	Kecamatan Sumber Barito	0,00	0,00
34.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	1.957.091,00	7.209.554,00
35.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	1.196.464,00	48.486,00
36.	Kecamatan Sungai Babuat	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
37.	Kecamatan Uut Murung	2.223.568	0,00
38.	Kecamatan Seribu Riam	4.971.455,00	0,00
39.	Inspektorat	4.956.901,00	2.219.927,00
40.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.004.346,00	1.973.133,00
41.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.774.231,00	5.555.664,00
42.	Badan Pendapatan Daerah	4.870.790,00	484.493,00
43.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.160.130,00	1.899.833,00
	<b>Jumlah</b>	<b>125.446.016,00</b>	<b>135.990.410,00</b>

**5.3.1.1.11. Persediaan**

Persediaan merupakan barang yang habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp54.742.986.927,02 dan Rp76.421.812.437,57 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	ATK	102.467.456,00	173.256.150,00
2.	Alat listrik & Elektronik(Lampu Pijar, Baterai Kering)	3.765.000,00	377.500,00
3.	Perangko, materai dan benda pos lainnya	651.000,00	27.000,00
4.	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	6.122.000,00	419.000,00
5.	Bahan Bakar Minyak/Gas	386.323.740,00	432.027.547,50
6.	Bahan Baku Bangunan	603.633.134,90	723.272.934,90
7.	Bahan Obat-obatan	5.545.591.213,12	3.752.694.199,10
8.	Bahan Kimia	399.730.500,00	659.721.679,07
9.	Suku Cadang Sarana Mobilitas	581.151.512,00	675.835.595,00
10.	Bahan Cetakan/Formulir	617.671.800,00	522.529.342,00
11.	Persediaan Lainnya	46.495.879.571,00	69.481.651.490,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.742.986.927,02</b>	<b>76.421.812.437,57</b>

Rincian persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.283.675.244,00	18.440.374.724,00
2.	Dinas Kesehatan	2.984.795.481,42	2.054.481.660,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	595.200.926,03	857.703.491,63
4.	BLUD RSUD	1.489.191.605,67	682.048.406,54
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.573.749.386,90	8.140.597.502,40
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.187.000,00	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.000,00	76.000,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	260.000,00	1.252.600,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	610.629.800,00	478.827.892,00
10.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	20.370.949.484,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	267.081.000,00	231.912.020,00
12.	Dinas Perhubungan	5.782.000,00	12.455.650,00
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.742.750,00	0,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	662.000,00
15.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	1.009.000,00
16.	Dinas Pertanian dan Perikanan	27.146.500,00	0,00
17.	Dinas Perkebunan	588.098.500,00	588.098.500,00
18.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	820.000,00
19.	Sekretariat Daerah	29.274.412.327,00	24.468.939.857,00
20.	Sekretariat DPRD	1.440.000,00	1.165.000,00
21.	Kecamatan Tanah Siang	0,00	1.514.000,00
22.	Kecamatan Laung Tuhup	4.549.000,00	9.530.000,00
23.	Kecamatan Permata Intan	1.043.000,00	1.115.000,00
24.	Kecamatan Sumber Barito	5.546.400,00	3.024.650,00
25.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	0,00	963.000,00
26.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	632.000,00	1.526.000,00
27.	Kecamatan Sei Babuat	835.000,00	8.872.000,00
28.	Kecamatan Uut Murung	1.660.000,00	1.416.000,00
29.	Kecamatan Seribu Riam	319.000,00	0,00
30.	Inspektorat	887.500,00	920.000,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.573.500,00	8.045.200,00
32.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.523.006,00	53.512.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.742.986.927,02</b>	<b>76.421.812.437,57</b>

**5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang**

Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp44.931.053.842,00 dan Rp38.681.053.842,00.

**5.3.1.2.1. Investasi Permanen**

Investasi Permanen merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp44.931.053.842,00 dan Rp38.681.053.842,00,00.

**5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp44.931.053.842,00 dan Rp38.681.053.842,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	PT Bank Pembangunan Kalteng	33.750.000.000,00	28.500.000.000,00
2.	PD Petak Malai Buluh Merindu	6.209.053.842,00	5.209.053.842,00
3.	PDAM Kabupaten Murung Raya	1.972.000.000,00	1.972.000.000,00
4.	PT Jamkrida Kalimantan Tengah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	Jumlah	44.931.053.842,00	38.681.053.842,00

**PT Bank Pembangunan Kalteng (Cost Method)**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	28.500.000.000,00	23.250.000.000,00
2.	Penambahan	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00
3.	Pengurangan	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>33.750.000.000,00</b>	<b>28.500.000.000,00</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana yang telah dirubah dengan Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

**PD Petak Malai Buluh Merindu (Equity Method)**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	5.209.053.842,00	5.209.053.842,00
2.	Penambahan	1.000.000.000,00	0,00
3.	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>6.209.053.842,00</b>	<b>5.209.053.842,00</b>

Pada tahun anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 dan SK Bupati Nomor 188.45/191/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Petak Malai Buluh Merindu Kabupaten Murung Raya Tahun 2017, maka penyertaan modal pada PD Petak Malai Buluh Merindu di tambah sebesar Rp1.000.000.000,00.

**PDAM Kabupaten Murung Raya (Cost Method)**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	1.972.000.000,00	1.972.000.000,00
2.	Penambahan	0,00	0,00
3.	Pengurangan	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.972.000.000,00</b>	<b>1.972.000.000,00</b>

Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Pihak Ketiga.

**PT JAMKRIDA Kalimantan Tengah ( Cost Method )**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo Awal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.	Penambahan	0,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
3.	Pengurangan	0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>

Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Jamkrida Kalimantan Tengah.

**5.3.1.3. Aset Tetap**

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.568.215.055.662,47 dan Rp2.508.136.063.093,59 dengan rincian sebagai berikut.

**5.3.1.3.1. Tanah**

Jumlah Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp267.850.552.099,00 dan Rp274.785.822.839,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Kampung	5.200.000,00	5.200.000,00
2.	Kuburan	18.505.080,00	18.505.080,00
3.	Ladang	1.653.150.866,00	1.653.150.866,00
4.	Perkebunan	6.430.810.009,00	6.430.810.009,00
5.	Kolam Ikan Tambak	598.428.000,00	598.428.000,00
6.	Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	12.345.017.648,00	10.809.849.648,00
7.	Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	3.900.442.400,00	3.075.477.900,00
8.	Bangunan Industri	398.363.700,00	398.363.700,00
9.	Bangunan Tempat Kerja/Jasa	222.530.959.536,00	226.801.988.776,00
10.	Kosong	46.810.000,00	46.810.000,00
11.	Peternakan	1.735.650.000,00	1.735.650.000,00
12.	Bangunan Pengairan	14.805.284,00	14.805.284,00
13.	Bangunan Jalan dan Jembatan	738.948.560,00	738.948.560,00
14.	Lapangan Penimbun Barang	2.978.904.360,00	2.817.544.360,00
15.	Lapangan Terbang	45.454.000,00	45.454.000,00
16.	Bangunan Jalan	504.140.000,00	0,00
17.	Bangunan Air	650.000,00	650.000,00
18.	Bangunan Gedung Olah Raga	1.560.679.273,00	1.560.679.273,00
19.	Bangunan Tempat Ibadah	3.359.928.000,00	3.359.928.000,00
20.	Sarana Umum Dermaga	481.328.400,00	481.328.400,00
21.	Sarana Umum Terminal	1.260.000,00	1.260.000,00
22.	Sarana Umum Pasar	35.222.000,00	35.222.000,00
23.	Sarana Umum Taman	5.816.985.473,00	5.816.985.473,00
24.	Sarana Kesehatan Puskesmas	1.698.979.600,00	1.698.979.600,00
25.	Sarana Pendidikan Pelatihan	929.929.910,00	6.619.803.910,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
26.	Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	20.000.000,00	20.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>267.850.552.099,00</b>	<b>274.785.822.839,00</b>

Rincian Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.977.468.950,00	44.660.839.190,00
2.	Dinas Kesehatan	4.406.614.790,00	4.406.614.790,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.128.709.214,00	2.128.709.214,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	119.848.957.300,00	118.788.097.300,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	635.668.000,00	0,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	144.976.000,00	144.976.000,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	152.930.000,00	152.930.000,00
8.	Dinas Sosial	0,00	182.122.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	182.122.000,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	680.550.320,00	397.372.000,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.017.620.000,00	1.017.620.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	738.984.000,00	738.984.000,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
16.	Dinas Perhubungan	438.750.000,00	438.750.000,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	151.208.000,00	151.208.000,00
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	14.420.214.560,00	13.196.886.360,00
22.	Ex. Dinas Kehutanan	1.987.730.000,00	2.342.166.320,00
23.	Ex. Dinas Perkebunan	0,00	398.363.700,00
24.	Dinas Pertambangan dan Energi	463.902.000,00	463.902.000,00
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	288.148.000,00	288.148.000,00
26.	Sekretariat Daerah	76.785.321.572,00	76.281.181.572,00
27.	Sekretariat DPRD	2.894.406.800,00	2.894.406.800,00
28.	Kecamatan Murung	1.304.053.000,00	510.328.000,00
29.	Kecamatan Tanah Siang	615.097.000,00	615.097.000,00
30.	Kecamatan Laung Tuhup	853.950.473,00	853.950.473,00
31.	Kecamatan Permata Intan	1.190.855.120,00	1.190.855.120,00
32.	Kecamatan Sumber Barito	307.682.000,00	307.682.000,00
33.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	75.000.000,00	75.000.000,00
34.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	391.493.000,00	391.493.000,00
35.	Kecamatan Sei Babuat	147.000.000,00	147.000.000,00
36.	Kecamatan Uut Murung	111.810.000,00	111.810.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
37.	Kecamatan Seribu Riam	99.750.000,00	99.750.000,00
38.	Inspektorat	452.558.000,00	452.558.000,00
39.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	259.858.000,00	259.858.000,00
40.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	357.028.000,00	357.028.000,00
41.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	340.136.000,00	340.136.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>267.850.552.099,00</b>	<b>274.785.822.839,00</b>

Saldo Aset tetap tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp267.850.552.099,00 berasal dari penambahan aset dari belanja modal tanah, dan pengurang aset tanah berasal dari reklasifikasi keluar ke aset lain-lain. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal		274.785.822.839,00
Penambahan		
Belanja Modal	3.819.357.500,00	
Jumlah Penambahan		3.819.357.500,00
Pengurangan		
Reklasifikasi Keluar	10.754.628.240,00	
Jumlah Pengurangan		10.754.628.240,00
Saldo Akhir		267.850.552.099,00

**Penambah :**

**Belanja Modal Tanah**

No	SOPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	1.060.860.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	635.668.000,00
3.	Dinas Pertanian dan Perikanan	824.964.500,00
4.	Sekretariat Daerah	504.140.000,00
5.	Kecamatan Murung	793.725.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.819.357.500,00</b>

**Pengurang :**

- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain berupa aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp4.993.496.240,00 yang merupakan tanah untuk bangunan SMAN yang diserahkan ke provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain berupa aset tetap tanah untuk sarana Pendidikan dan pelatihan Rp5.689.874.000,00 yang merupakan tanah untuk bangunan SMAN yang diserahkan ke provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain dari aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa pada ex. Dinas Kehutanan sebesar Rp71.258.000,00 yang di mutasi ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah karena akan diserahkan ke provinsi.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp397.404.730.382,59 dan Rp388.248.488.449,91, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Alat-alat Besar Darat	22.181.020.130,00	22.181.020.130,00
2.	Alat-alat Bantu	6.339.439.861,00	6.269.304.861,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	122.322.252.794,00	120.679.748.113,00
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.295.000,00	10.295.000,00
5.	Alat Angkut Apung Bermotor	4.922.687.068,00	4.627.772.068,00
6.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	86.550.000,00	86.550.000,00
7.	Alat Bengkel Bermesin	1.536.511.154,00	822.335.654,00
8.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.124.474.100,00	965.459.100,00
9.	Alat Ukur	2.937.734.650,00	2.856.699.650,00
10.	Alat Pengolahan	2.847.547.110,00	5.685.758.603,00
11.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	321.316.350,00	276.848.950,00
12.	Alat Kantor	25.770.814.619,98	25.177.772.618,09
13.	Alat Rumah Tangga	60.391.336.459,79	56.998.556.594,00
14.	Komputer	54.305.367.157,82	53.624.807.154,82
15.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.437.168.403,00	15.101.608.677,00
16.	Alat Studio	15.856.971.993,00	15.529.392.372,00
17.	Alat Komunikasi	3.607.657.806,00	3.363.642.143,00
18.	Peralatan Pemancar	1.647.582.150,00	1.587.832.150,00
19.	Alat Kedokteran	28.846.766.721,00	28.056.375.289,00
20.	Alat Kesehatan	3.993.902.323,00	2.426.132.558,00
21.	Unit-Unit Laboratorium	18.290.294.032,00	17.947.157.302,00
22.	Alat Peraga/Praktik Sekolah	1.426.529.000,00	2.051.327.963,00
24.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.990.500,00	2.990.500,00
25.	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	39.000.000,00	39.000.000,00
26.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	240.430.000,00	240.430.000,00
27.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.228.086.000,00	1.228.086.000,00
28.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	21.080.000,00	21.080.000,00
29.	Senjata Api	15.600.000,00	15.600.000,00
30.	Persenjataan Non Senjata Api	103.900.000,00	103.900.000,00
31.	Alat Keamanan dan Perlindungan	1.549.425.000,00	271.005.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.404.730.382,59</b>	<b>388.248.488.449,91</b>

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.321.068.497,00	25.755.911.490,00
2.	Dinas Kesehatan	43.665.926.102,00	40.162.937.443,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	24.023.079.266,00	20.185.397.614,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.068.770.541,00	34.787.976.541,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	492.273.150,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.057.933.038,00	2.980.151.788,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.539.838.585,00	2.610.990.260,00
8.	Dinas Sosial	141.630.000,00	5.617.931.250,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.537.647.260,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	2.164.287.131,00	1.953.264.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	7.679.675.650,00	7.422.996.250,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.019.251.497,00	6.448.596.497,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.046.938.706,00	7.450.879.665,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.674.334.130,00	4.957.084.005,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.589.093.032,00	1.754.329.532,00
16.	Dinas Perhubungan	12.264.249.886,00	10.959.593.486,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	253.025.000,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.365.206.450,00	1.982.664.650,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.570.907.000,00	1.483.415.000,00
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.112.829.650,00	4.925.064.650,00
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	13.369.263.592,00	8.059.089.832,00
22.	Ex. Dinas Kehutanan	12.100.264.246,09	13.158.220.863,09
23.	Ex. Dinas Perkebunan	0,00	8.657.085.253,00
24.	Ex. Dinas Pertambangan dan Energi	16.758.930.744,00	16.758.930.744,00
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.299.710.749,00	4.418.535.749,00
26.	Sekretariat Daerah	85.676.133.619,68	83.852.163.278,00
27.	Sekretariat DPRD	19.097.959.781,00	19.543.934.048,00
28.	Kecamatan Murung	3.701.036.100,00	3.708.196.100,00
29.	Kecamatan Tanah Siang	2.300.645.859,00	2.002.866.859,00
30.	Kecamatan Laung Tuhup	3.296.631.968,00	3.431.231.868,00
31.	Kecamatan Permata Intan	3.800.239.217,00	3.436.020.217,00
32.	Kecamatan Sumber Barito	2.346.023.895,00	2.308.685.888,00
33.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	2.024.478.211,00	1.944.767.211,00
34.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	2.279.412.932,00	1.907.181.932,00
35.	Kecamatan Sei Babuat	1.760.457.850,00	2.058.659.150,00
36.	Kecamatan Uut Murung	2.750.646.356,00	2.665.305.656,00
37.	Kecamatan Seribu Riam	3.486.576.252,00	3.345.672.620,00
38.	Inspektorat	4.033.360.360,00	4.624.472.360,00
39.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.050.705.599,82	7.039.320.070,82
40.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.449.541.080,00	6.451.087.230,00
41.	Badan Pendapatan Daerah	3.149.176.400,00	3.031.176.400,00
42.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.085.571.000,00	4.406.701.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.404.730.382,59</b>	<b>388.248.488.449,91</b>

Saldo Aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp397.404.730.382,59 berasal dari penambahan aset dari belanja modal peralatan dan mesin, reklasifikasi masuk



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

dan koreksi masuk. Pengurangan aset peralatan dan mesin berasal dari penghapusan, reklasifikasi keluar dan koreksi keluar. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal		388.248.488.449,91
Penambahan		
Belanja Modal	20.602.219.337,00	
Reklasifikasi Masuk	1.924.869.000,00	
Koreksi Ekstrakomptabel	1.741.237.784,68	
Jumlah Penambahan		24.268.326.121,68
Pengurangan		
Penghapusan Aset Tetap	3.597.635.451,00	
Reklasifikasi Keluar	10.376.839.983,00	
Koreksi Ekstrakomptabel	1.137.608.755,00	
Jumlah Pengurangan		15.112.084.189,00
<b>Saldo Akhir</b>		<b>397.404.730.382,59</b>

**Belanja Modal**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.777.631.050,00
2.	Dinas Kesehatan	3.843.695.857,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	3.852.698.923,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.679.000,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	492.273.150,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.100.000,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	176.248.000,00
8.	Dinas Sosial	144.130.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	923.521.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	190.713.131,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	356.351.400,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	592.041.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	238.330.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	746.801.631,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	841.313.500,00
16.	Dinas Perhubungan	25.000.000,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	260.311.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	348.616.800,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.000.000,00
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	205.381.000,00
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	12.418.000,00
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	869.475.000,00
26.	Sekretariat Daerah	2.541.568.995,00
27.	Sekretariat DPRD	39.882.400,00
28.	Kecamatan Murung	27.335.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Nilai (Rp)
29.	Kecamatan Tanah Siang	278.915.000,00
30.	Kecamatan Laung Tuhup	143.000.000,00
31.	Kecamatan Permata Intan	308.130.000,00
32.	Kecamatan Sumber Barito	27.450.000,00
33.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	39.430.000,00
34.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	395.676.000,00
35.	Kecamatan Sei Babuat	83.090.000,00
36.	Kecamatan Uut Murung	74.960.000,00
37.	Kecamatan Seribu Riam	142.900.000,00
38.	Inspektorat	84.550.000,00
39.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	134.907.000,00
40.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	105.735.500,00
41.	Badan Pendapatan Daerah	0,00
42.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>20.715.659.337,00</b>

Terdapat selisih antara penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp113.440.000,00 dikarenakan pembayaran utang pengadaan aset untuk Tahun Anggaran 2016 pada Sekretariat Daerah.

**Pembayaran Utang Pengadaan**

- Pengadaan meubelair *velbed* SPK Nomor 027/315/SPK-SETDA/PLKP/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016, BAP Nomor 027/315/BAP tanggal 8 Desember 2016 CV An-Nsyk Permai sebesar Rp19.500.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- Pengadaan notebook sesuai SPK Nomor 51.DK-MR/PBJP/SPK/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp78.000.000,00. (Utang Ex. Dinas Kehutanan tahun 2016)
- Pengadaan meubelair sesuai SPK Nomor 90/DK-MR/PBJP/SP/XII/2016 tanggal 4 Nopember 2016 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.940.000,00. (Utang Ex. Dinas Kehutanan tahun 2016)

**Reklasifikasi Masuk**

- Reklasifikasi beban dana BOS ke peralatan dan mesin berupa alat computer printer pada SD Negeri dan SMP Negeri yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp552.019.000,00.
- Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin berupa teralis sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Reklasifikasi pembangkit listrik tenaga diesel/dynamo pada Kecamatan Sei Babuat sebesar Rp23.900.000,00.
- Reklasifikasi beban barang jasa kantor untuk beban jasa kawat/faximile/internet berupa pembelian printer pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp7.500.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- e. Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke peralatan mesin berupa alat bantu pompa sebesar Rp29.550.000,00 pada Kecamatan Tanah Siang Selatan
- f. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan mesin berupa meubelair Rp47.570.000,00 pada Kecamatan Permata Intan
- g. Reklasifikasi dari aset lain-lain ke peralatan mesin alat kantor lainnya Rp1.200.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- h. Reklasifikasi dari aset lain-lain ke peralatan mesin alat kantor lainnya Rp3.710.000,00 pada Kecamatan Tanah Siang
- i. Reklasifikasi pengadaan dan pemasangan rambu isyarat berupa rambu lalu lintas darat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.249.420.000,00

**Koreksi Masuk Ekstrakompatabel**

- a. Koreksi Ekstrakompatabel untuk peralatan mesin yang akan diserahkan ke provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp348.124.557,00
- b. Koreksi Ekstrakompatabel untuk peralatan mesin alat rumah tangga lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp95.357.481,00
- c. Koreksi Ekstrakompatabel untuk peralatan mesin alat rumah tangga lainnya sebesar Rp132.239.204,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah
- d. Koreksi Ekstrakompatabel untuk peralatan alat rumah tangga lainnya sebesar Rp26.115.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Koreksi Ekstrakompatabel peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya sebesar Rp2.681.250,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Koreksi Ekstrakompatabel peralatan dan mesin alat kantor lainnya sebesar Rp42.891.645,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Koreksi Ekstrakompatabel peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya sebesar Rp81.315.360,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- h. Koreksi Ekstrakompatabel sebesar Rp5.512.000,00 peralatan dan mesin peralatan studio visual pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- i. Koreksi Ekstrakompatabel sebesar Rp209.806.894,00 peralatan mesin alat rumah tangga lainnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM
- j. Koreksi Ekstrakompatabel alat penyimpanan perlengkapan kantor, meubelair, dan alat rumah tangga lainnya sebesar Rp649.641.686,68 pada Sekretariat Daerah
- k. Koreksi Ekstrakompatabel peralatan mesin kendaraan dinas perorangan, alat rumah tangga lainnya, alat kantor lainnya pada Kecamatan sebesar Rp127.552.707,00
- l. Koreksi Ekstrakompatabel gedung bangunan tahun 2016 yang direklas ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Sei Babuat sebesar Rp20.000.000,00

**Penghapusan**

- a. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp894.242.340,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- b. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 188.45/217/BPKAD tanggal 22 Mei 2017 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp330.000.000,00.
- c. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp150.000.000,00.
- d. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp337.500.000,00.
- e. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp515.350.000,00.
- f. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp129.408.481,00.
- g. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp63.778.260,00.
- h. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/578/BPKAD tanggal 19 Oktober 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp18.000.000,00.
- i. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 024/717/BPKAD tanggal 12 Desember 2017 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp290.291.320,00.
- j. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 028/578/BPKAD tanggal 27 Desember 2017 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp378.042.000,00.
- k. Penghapusan aset peralatan dan mesin /mobil/motor dinas sesuai SK Pengelola BMD. Nomor 028/759/BPKAD tanggal 27 Desember 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp491.023.050,00.

**Reklasifikasi Keluar**

- a. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat peraga sekolah ke aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan sebesar Rp149.810.000,00 dan reklasifikasi ke aset lainnya berupa peralatan dan mesin yang ada pada SMA Negeri yang akan diserahkan ke provinsi sebesar Rp4.514.114.280,00, reklasifikasi ke persediaan lainnya yang merupakan aset peralatan dan mesin yang dikuasai oleh swasta (SMA Presiden dan SMA Muhammadiyah) sebesar Rp298.693.320 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Reklasifikasi alat angkut apung bermotor, alat pendingin, peralatan studio visual dan peralatan studio video dan film ke beban barang dan jasa sebesar Rp23.022.000,00. Dan alat laboratorium, alat kantor lainnya, alat rumah tangga lainnya (*home use*), alat kesehatan perawatan ke beban lain-lain pada Dinas Kesehatan sebesar Rp267.439.198,00;
- c. Reklasifikasi Reklasifikasi peralatan mesin peralatan mini komputer, peralatan jaringan dan alat kedokteran ke beban barang dan jasa sebesar Rp70.260.000,00. Dan



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

- peralatan mesin alat dapur, perkakas bengkel dan alat kedokteran umum ke beban lain-lain sebesar Rp69.996.475,00, dan peralatan jaringan ke aset tidak berwujud sebesar Rp7.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat bantu elektrik generating set ke beban barang dan jasa sebesar Rp33.048.000,00. Peralatan dan mesin meubelair ke beban lain-lain sebesar Rp75.450.000,00, meubelair ke aset tetap lainnya sebesar Rp15.000.000,00 pada Sekretariat Daerah;
  - e. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat kantor lainnya ke beban lain-lain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp26.800.000,00;
  - f. Reklasifikasi peralatan dan mesin perkakas bengkel service ke beban barang dan jasa sebesar Rp2.100.000,00 dan reklasifikasi meubelair ke gedung dan bangunan sebesar Rp49.400.000,00 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. Reklasifikasi peralatan dan mesin perkakas bengkel kerja ke beban barang dan jasa sebesar Rp33.375.000,00 dan reklasifikasi dari alat rumah tangga ke beban lain-lain sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lainnya yang akan diserahkan ke provinsi (mutasi dari ex. Dinas Kehutanan ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sebesar Rp918.501.617,00;
  - i. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat pengolahan tanah dan tanaman ke beban barang dan jasa sebesar Rp2.845.831.493,00, reklasifikasi peralatan dan mesin alat pengolahan tanah dan tanaman ke beban lain-lain sebesar Rp5.648.000,00 pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
  - j. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat pemeliharaan taman dan alat rumah tangga lainnya ke beban barang dan jasa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp108.114.000,00 dan reklasifikasi peralatan dan mesin alat bantu pompa dan alat dapur ke beban lain-lain sebesar Rp22.908.000,00;
  - k. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat laboratorium ke beban barang dan jasa pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp9.995.000,00;
  - l. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat kantor lainnya ke beban barang dan jasa pada Dinas Sosial sebesar Rp2.500.000,00;
  - m. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat bantu keamanan ke beban barang dan jasa sebesar Rp1.900.000 dan alat dapur ke beban lain-lain sebesar Rp15.716.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - n. Reklasifikasi peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan sebesar Rp216.482.932,00 ke gedung dan bangunan pada Kecamatan Laung Tuhup;
  - o. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat perlindungan ke beban barang dan jasa pada Kecamatan Uut Murung sebesar Rp1.600.000,00;
  - p. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya dan perkakas bengkel service ke beban barang dan jasa sebesar Rp21.386.000,00;
  - q. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat dapur ke beban lain-lain pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp6.550.000,00;
  - r. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya ke beban lain-lain pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp7.286.000,00;
  - s. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya ke beban lain-lain pada Kecamatan Barito Tuhup Raya sebesar Rp28.295.000,00;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

- t. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya dan peralatan jaringan ke beban lain-lain pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.000.000,00;
- u. Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lain-lain sebesar Rp487.621.300,00 pada Kecamatan Sei Babuat;
- v. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya ke beban lain-lain pada Kecamatan Tanah Siang sebesar Rp4.000.000,00;
- w. Reklasifikasi peralatan dan mesin alat rumah tangga lainnya ke beban lain-lain pada Kecamatan Seribu Riam sebesar Rp1.996.368,00.

**Koreksi Keluar Ekstrakomptabel**

- a. Koreksi barang Ekstrakomptabel alat bantu generating set pada PKM Mangkahui Dinas Kesehatan dari belanja Dana Kapitasi FKTP sebesar Rp1.210.000,00;
- b. Koreksi barang ekstrakomptabel alat pompa pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp16.870.000,00;
- c. Koreksi barang Ekstrakomptabel alat kantor lainnya pada PKM Muara Tuhup (Dinas Kesehatan) sebesar Rp3.000.000,00, sebesar Rp9.930.000,00 pada PKM Tumbang Kunyi, sebesar Rp605.000,00 pada PKM Saripoi, sebesar Rp1.450.000,00 pada PKM Puruk Cahu;
- d. Koreksi barang Ekstrakomptabel peralatan personal komputer, personal komputer, alat rumah tangga lainnya sebesar Rp124.447.909,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Koreksi Ekstrakomptabel alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya sebesar Rp485.856.667,00 pada Sekretariat DPRD;
- f. Koreksi Ekstrakomptabel alat kantor lainnya, meubelair pada Kecamatan Murung sebesar Rp34.495.000,00;
- g. Koreksi Ekstrakomptabel alat bantu generating set sebesar Rp61.116.968,00 pada Kecamatan Laung Tuhup;
- h. Koreksi Ekstrakomptabel peralatan mesin meubelair dan personal komputer sebesar Rp338.162.000,00;
- i. Koreksi barang Ekstrakomptabel peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp59.743.211,00;
- j. Koreksi barang Ekstrakomptabel peralatan jaringan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp722.000,00.

**5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.200.964.104.996,70 dan Rp1.160.338.621.759,23, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Bangunan GedungTempat Kerja	946.057.823.783,70	909.979.136.786,23
2.	Bangunan GedungTempat Tinggal	242.349.304.456,00	236.602.918.216,00
3.	Bangunan Menara	1.308.614.002,00	1.308.614.002,00
4.	Bangunan Bersejarah	1.493.359.570,00	1.493.359.570,00
5.	Tugu Peringatan	639.317.500,00	639.317.500,00
6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	6.880.422.485,00	6.880.422.485,00
7.	Tugu Peringatan	149.670.000,00	99.840.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
8.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	124.750.000,00	124.750.000,00
9.	Rambu-Rambu	1.960.843.200,00	3.210.263.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200.964.104.996,70</b>	<b>1.160.338.621.759,23</b>

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	226.913.046.671,85	240.874.117.591,85
2.	Dinas Kesehatan	81.940.669.939,00	66.862.517.785,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.674.755.370,00	15.633.889.995,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.632.008.395,25	274.332.686.758,50
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.352.590.250,00	1.352.590.250,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	827.477.000,00	827.477.000,00
7.	Dinas Sosial	0,00	13.629.271.220,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.629.271.220,00	0,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	417.716.000,00	417.716.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	6.998.998.600,00	5.631.624.000,00
11.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.719.675.000,00	5.519.175.000,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.568.052.400,00	4.309.708.952,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.261.130.404,00	6.024.000.404,00
14.	Dinas Perhubungan	35.755.038.009,50	35.505.207.714,78
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.134.000,00	86.934.000,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.762.408.950,00	0,00
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.171.400.765,00	15.505.790.065,00
18.	Dinas Pertanian dan Perikanan	24.606.037.202,00	19.948.035.569,00
19.	Ex. Dinas Kehutanan	13.982.663.000,00	15.860.600.040,00
20.	Ex. Dinas Perkebunan	0,00	4.355.035.574,00
21.	Ex. Dinas Pertambangan dan Energi	1.336.213.000,00	3.713.813.950,00
22.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.796.712.600,00	22.076.570.598,00
23.	Sekretariat Daerah	306.537.352.791,10	307.148.241.691,10
24.	Sekretariat DPRD	41.975.450.516,00	41.977.950.516,00
25.	Kecamatan Murung	4.906.635.720,00	4.843.030.720,00
26.	Kecamatan Tanah Siang	2.452.732.000,00	2.452.732.000,00
27.	Kecamatan Laung Tuhup	5.904.971.250,00	5.489.003.318,00
28.	Kecamatan Permata Intan	4.849.197.500,00	4.632.047.500,00
29.	Kecamatan Sumber Barito	5.675.381.000,00	5.615.381.000,00
30.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	2.986.696.000,00	2.813.796.000,00
31.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	4.901.424.500,00	5.000.762.000,00
32.	Kecamatan Sei Babuat	3.043.002.600,00	2.864.672.600,00
33.	Kecamatan Uut Murung	7.064.504.900,00	7.064.504.900,00
34.	Kecamatan Seribu Riam	3.277.313.000,00	3.277.313.000,00
35.	Inspektorat	4.725.160.194,00	4.697.459.794,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
36.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.249.094.140,00	4.994.994.144,00
37.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.170.971.900,00	2.158.751.900,00
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.841.218.209,00	2.841.218.209,00
	Jumlah	1.200.964.104.996,70	1.160.338.621.759,23

Saldo Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.200.964.104.996,70 berasal dari penambahan aset dari belanja modal gedung dan bangunan, reklasifikasi masuk dan koreksi masuk. Pengurangan aset gedung dan bangunan berasal dari penghapusan, reklasifikasi keluar dan koreksi keluar. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.160.338.621.759,23
Penambahan	
Belanja Modal	63.724.150.702,75
Reklasifikasi Masuk	1.679.723.932,00
Koreksi Ekstrakomptabel	22.227.846.677,72
Koreksi Utang	16.490.000,00
Jumlah Penambahan	87.648.211.312,47
Pengurangan	
Reklasifikasi Keluar	46.139.499.075,00
Ekstrakomptabel	740.213.500,00
Koreksi Utang	143.015.500,00
Jumlah Pengurangan	47.022.728.075,00
Saldo Akhir	1.200.964.104.996,70

**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.473.796.250,00
2.	Dinas Kesehatan	13.828.877.454,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.285.460.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.249.999.188,75
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	49.100.000,00
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.450.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	280.900.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.200.000,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.543.450,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175.550.000,00
11.	Dinas Perhubungan	5.562.022.500,00
12.	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	437.952.200,00
13.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	23.600.000,00
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.720.142.000,00
15.	Sekretariat Daerah	1.059.980.000,00
16.	Kecamatan Murung	132.780.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Nilai (Rp)
17.	Kecamatan Laung Tuhup	199.485.000,00
18.	Kecamatan Permata Intan	413.300.000,00
19.	Inspektorat	27.700.000,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	229.100.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.560.938.042,75</b>

Terdapat selisih antara penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp6.836.787.340,00 dikarenakan pembayaran utang pengadaan aset untuk Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut.

**Pembayaran Utang :**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	95.250.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	5.724.257.340,00
3.	Sekretariat Daerah	74.820.000,00
4.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	823.800.000,00
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	118.660.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.836.787.340,00</b>

**Reklasifikasi Masuk**

- a. Reklasifikasi aset beban barang dan jasa perencanaan ke aset gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp295.495.000,00;
- b. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp79.900.000,00;
- c. Reklasifikasi dari jalan irigasi dan jaringan ke bangunan menara air tawar Rp47.400.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Reklasifikasi aset tetap renovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp31.350.000,00;
- e. Reklasifikasi peralatan dan mesin meubelair pada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa sebesar Rp49.400.000,00. Dan Rp12.180.000,00 reklasifikasi dari bangunan pelengkap air ke gedung dan bangunan;
- f. Reklasifikasi aset tetap renovasi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp167.700.000,00;
- g. Reklasifikasi dari peralatan mesin ke gedung dan bangunan sebesar Rp216.482.932,00 pada Kecamatan Laung Tuhup;
- h. Reklasifikasi dari aset lainnya Rp60.000.000,00 ke gedung dan bangunan pada Kecamatan Permata Intan;
- i. Reklasifikasi dari KDP gedung bangunan tempat olahraga dan tempat ibadah Rp88.900.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Rp9.100.000,00 pada Dinas Perhubungan untuk bangunan tempat kerja;
- j. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan jalan khusus ke bangunan gedung pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp192.750.000,00;
- k. Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan bangunan menara air ke aset bangunan gedung pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp34.908.500,00. Sebesar Rp9.427.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk jaringan



## **Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

transmisi, Rp211.830.000,00 untuk reklasifikasi ke jalan irigasi jaringan pada Kecamatan Sei Babuat, Rp172.900.000,00 reklasifikasi untuk jalan khusus ke gedung dan bangunan pada Kecamatan Tanah Siang Selatan.

### **Barang Masuk Ekstrakomptabel**

- a. Koreksi ekstrakomptabel bangunan gedung kantor tahun pada ex. Dinas Pertambangan dan Energi karena di mutasi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp384.808.000,00;
- b. Koreksi ekstrakomptabel bangunan gedung kantor tahun 2016 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp15.950.000,00;
- c. Koreksi Ekstrakomptabel untuk gedung bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp21.827.088.677,72.

### **Koreksi Utang**

Koreksi utang pengadaan aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.800.000,00 dan utang peningkatan rehabilitasi interior Radio Smura FM sebesar Rp14.690.000,00

### **Reklasifikasi Keluar**

- a. Reklasifikasi gedung bangunan tempat pendidikan ke KDP gedung bangunan tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.888.750,00 dan ke Aset Lainnya yang akan dihibahkan ke Provinsi sebesar Rp36.382.905.920,00;
- b. Reklasifikasi dari gedung bangunan ke aset lainnya sebesar Rp164.779.625,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Reklasifikasi bangunan gedung ke KDP bangunan gedung sebesar Rp992.181.940,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, reklasifikasi gedung bangunan ke peralatan mesin (alat rumah tangga) sebesar Rp10.000.000,00;
- d. Reklasifikasi gedung bangunan kantor ke beban barang dan jasa pemeliharaan gedung kantor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp128.200.000,00;
- e. Reklasifikasi gedung bangunan kantor ke KDP gedung bangunan terminal/pelabuhan/bandara (*study masterplan* daerah pergeseran) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.545.732.500,00;
- f. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan kantor ke KDP gedung bangunan terminal/pelabuhan/bandara (*study rencana teknik terinci sisi udara*) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.782.790.000,00;
- g. Reklasifikasi gedung bangunan ke KDP gedung bangunan terminal/pelabuhan/bandara (*study rencana teknik terinci sisi darat*) pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.290.600.000,00;
- h. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan rambu bersuar lalu lintas darat ke peralatan dan mesin Dinas Perhubungan sebesar Rp1.249.420.000,00;
- i. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan kantor ke KDP gedung kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp49.100.000,00;
- j. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke KDP bangunan gedung kantor pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp23.600.000,00;



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

- k. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke aset tetap KDP gedung bangunan kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp39.450.000,00;
- l. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp150.640.000,00, sebesar Rp44.400.000,00 ke KDP Gedung Bangunan, Rp1.476.558.900,00 reklas ke Aset Lainnya;
- m. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke KDP gedung bangunan berupa perencanaan gedung kantor sebesar Rp44.900.000,00 pada Kecamatan Murung;
- n. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke aset lainnya ex Dinas Kehutanan sebesar Rp698.781.440,00;
- o. Reklasifikasi aset tetap gedung bangunan ke meubeller sebesar Rp47.570.000,00 pada Kecamatan Permata Intan.

**Ekstrakomptabel**

Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp740.213.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat DPRD, Kecamatan Murung, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Barito Tuhup Raya, dan Kecamatan Sei Babuat.

**Koreksi Utang**

- a. Koreksi utang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.800.000,00;
- b. Koreksi penghapusan utang pengadaan aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu untuk pekerjaan penambahan ruang kantor BPKAD, karena putus kontrak sebesar Rp119.767.000,00;
- c. Koreksi penghapusan utang pengadaan aset pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, untuk utang pengadaan aset bangunan gedung pertokoan sebesar Rp15.061.000,00.
- d. Koreksi utang pengadaan aset gedung dan bangunan tempat pendidikan tahun 2016 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.387.500,00

**5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.622.361.408.511,58 dan Rp1.450.819.743.289,68 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Jalan	931.836.210.571,38	803.505.013.013,68
2.	Jembatan	305.591.561.979,10	284.734.948.747,00
3.	Bangunan Air Irigasi	86.810.390.135,00	83.743.824.135,00
4.	Bangunan Pengaman Sungai dan PBA	8.249.236.300,00	8.390.481.300,00
5.	Bangunan Pengembangan Sumber Air & Air Tanah	855.940.000,00	739.885.000,00
6.	Bangunan Air Bersih/Baku	144.198.396.648,10	127.575.533.866,00
7.	Bangunan Air Kotor	1.343.659.000,00	913.619.000,00
8.	Bangunan Air	37.990.000,00	120.298.500,00
9.	Instalasi Air Minum/Air Bersih	7.133.636.500,00	5.606.976.500,00
10.	Instalasi Air Kotor	499.408.000,00	499.408.000,00
11.	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	2.582.804.000,00	2.640.190.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
12.	Instalasi Pembangkit Listrik	3.121.324.900,00	3.134.824.900,00
13.	Instalasi Gardu Listrik	82.665.546.591,00	82.407.368.591,00
14.	Jaringan Air Minum	19.159.481.437,00	18.613.421.787,00
15.	Jaringan Listrik	27.970.607.450,00	27.888.734.950,00
16.	Jaringan Telepon	305.215.000,00	305.215.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.622.361.408.511,58</b>	<b>1.450.819.743.289,68</b>

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 pada masing-masing SOPD dapat disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.208.585.000,00	1.208.585.000,00
2.	Dinas Kesehatan	305.964.993,00	157.115.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	4.525.722.000,00	4.583.108.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.458.275.290.465,08	1.296.617.055.986,68
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.838.135.249,50	0,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.500.000,00	39.500.000,00
7.	Dinas Sosial	0,00	302.870.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	443.670.000,00	0,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	19.830.000,00	19.830.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	641.070.000,00	289.640.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	368.133.000,00	368.133.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	12.180.000,00
13.	Dinas Perhubungan	512.979.100,00	512.979.100,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.400.000,00	4.400.000,00
15.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	57.922.100,00	0,00
16.	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	273.400.000,00	308.308.500,00
17.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	14.383.115.020,00	6.585.171.300,00
18.	Ex. Dinas Kehutanan	12.759.313.300,00	13.173.783.300,00
19.	Ex. Dinas Perkebunan	0,00	4.600.469.219,00
20.	Ex. Dinas Pertambangan dan Energi	110.087.327.528,00	110.145.249.628,00
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	135.718.000,00	45.940.000,00
22.	Sekretariat Daerah	6.276.910.756,00	7.280.945.756,00
23.	Sekretariat DPRD	1.805.865.000,00	1.782.065.000,00
24.	Kecamatan Murung	2.563.500,00	2.563.500,00
25.	Kecamatan Tanah Siang	29.925.000,00	29.925.000,00
26.	Kecamatan Laung Tuhup	99.894.000,00	99.894.000,00
27.	Kecamatan Sumber Barito	24.985.000,00	24.985.000,00
28.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	298.350.000,00	471.250.000,00
29.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	188.939.500,00	178.639.500,00
30.	Kecamatan Sei Babuat	0,00	211.830.000,00
31.	Kecamatan Uut Murung	801.440.000,00	801.440.000,00
32.	Kecamatan Seribu Riam	122.400.000,00	122.400.000,00
33.	Inspektorat	59.860.000,00	59.860.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	501.850.000,00	501.850.000,00
35.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	198.850.000,00	208.277.500,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	69.500.000,00	69.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.622.361.408.511,58</b>	<b>1.450.819.743.289,68</b>

Saldo Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.622.361.408.511,58 berasal dari penambahan aset dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, reklasifikasi masuk dan koreksi masuk. Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan berasal dari reklasifikasi keluar dan koreksi keluar. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.450.819.743.289,68
Penambahan	
Belanja Modal	107.901.126.749,50
Reklasifikasi Masuk	150.640.000,00
Koreksi Ekstrakomptabel	66.712.821.121,40
Koreksi Utang	104.725.000,00
Jumlah Penambahan	174.869.312.870,90
Pengurangan	
Reklasifikasi Keluar	2.052.847.500,00
Koreksi Utang	161.252.550,00
Reklasifikasi Ekstrakompatabel	1.113.547.599,00
Jumlah Pengurangan	3.327.647.649,00
Saldo Akhir	1.622.361.408.511,58

**Belanja Modal**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	79.900.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum	111.100.869.335,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7.896.621.749,50
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	140.800.000,00
5.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	306.257.500,00
6.	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.488.581.000,00
7.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.778.000,00
8.	Sekretariat Daerah	9.390.000,00
9.	Kecamatan Laung Tuhup	49.790.000,00
10.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	29.550.000,00
11.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	10.300.000,00
12.	Kecamatan Sungai Babuat	23.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>123.225.737.584,50</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Terdapat selisih antara penambahan dari Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp15.324.610.835,00 dikarenakan pembayaran utang pengadaan aset untuk Tahun Anggaran 2016 yang dapat disajikan sebagai berikut.

**Pembayaran Utang**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum	15.238.062.335,00
2.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	36.000.000,00
3.	Sekretariat Daerah	15.640.000,00
4.	Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga	34.908.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.324.610.835,00</b>

**Reklasifikasi Masuk**

Reklasifikasi Gedung dan Bangunan rumah Negara golongan III ke jalan irigasi dan jaringan berupa jalan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp150.640.000,00.

**Ekstrakomptabel**

- Koreksi Ekstrakomptabel Jalan Khusus pada Dinas Kesehatan sebesar Rp148.849.993,00;
- Koreksi Ekstrakomptabel Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena Kapitalisasi sebesar Rp66.540.171.128,40;
- Koreksi Ekstrakomptabel Instalasi Gardu Listrik pada Sekretariat DPRD sebesar Rp23.800.000,00.

**Reklasifikasi Keluar**

- Reklasifikasi instalasi pengolahan sampah non organic reklas ke gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp79.900.000,00;
- Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp58.486.500,00;
- Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan khusus pada Dinas Pertanian dan Perikanan sebesar Rp9.550.000,00, reklasifikasi ke beban hibah pada kelompok masyarakat sebesar Rp6.000.000,00;
- Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke bangunan gedung kantor berupa pembuatan tangga pada panggung di Alun-alun Jorih Jerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp192.750.000,00 dan Rp34.908.500,00 reklas ke Bangunan Menara Air;
- Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin pada Kecamatan Sei Babuat sebesar Rp23.900.000,00 dan reklasifikasi ke gedung bangunan dari bangunan pembuang pengaman pada Kecamatan Sungai Babuat sebesar Rp211.830.000,00;
- Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin berupa alat bantu pompa pada Kecamatan Tanah Siang Selatan sebesar Rp29.550.000,00 dan Rp172.900.000,00 reklasifikasi dari jalan khusus ke gedung bangunan;
- Reklasifikasi dari Jalan Khusus ke Aset Lain-lain pada Sekretariat Daerah



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

- Rp.1.164.065.000,00;
- h. Reklasifikasi Jaringan Transmisi ke Gedung Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.9.427.500,00;
  - i. Reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke gedung bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp47.400.000,00;
  - j. Reklasifikasi jalan irigasi dan jaringan ke gedung bangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp12.180.000,00.

**Koreksi Utang**

Koreksi utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp161.252.550,00.

**Reklasifikasi Ekstrakomptabel**

- a. Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel pada Kecamatan Laung Tuhup yaitu penambahan daya listrik kantor sebesar Rp49.790.000,00;
- b. Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu penambahan daya listrik panggung di Alun-alun Jorih Jerah sebesar Rp49.899.000,00 dan Rp28.700.000,00 Jalan Khusus;
- c. Reklasifikasi ke barang ekstrakomptabel pada Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu penambahan daya listrik kantor sebesar Rp24.850.000,00, jaringan pipa distribusi sebesar Rp36.000.000,00 dan Ekstrakomptabel Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Jalan Khusus Rp178.706.499,00;
- d. Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomptabel pada Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Instalasi pengolahan sampah Non Organik Rp57.386.000,00;
- e. Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomptabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jembatan Kabupaten, dan Jembatan Penyebrangan sebesar Rp688.216.100,00.

**5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp23.090.349.124,60 dan Rp19.780.015.484,60 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Buku	8.362.179.980,34	5.454.980.227,00
2.	Terbitan	50.539.000,00	0,00
3.	Barang-barang Perpustakaan	1.296.437.000,00	1.291.437.000,00
4.	Barang Bercorak Kebudayaan	3.542.461.672,00	3.371.036.672,00
5.	Alat Olah Raga Lainnya	2.892.322.695,26	2.740.952.808,60
6.	Hewan	2.403.400.135,00	2.403.400.135,00
7.	Tanaman	4.174.614.642,00	4.149.814.642,00
8.	Aset Tetap Renovasi	111.302.000,00	111.302.000,00
9.	Rambu-rambu Lalu Lintas	257.092.000,00	257.092.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.090.349.124,60</b>	<b>19.780.015.484,60</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 pada masing-masing SOPD disajikan sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.535.108.203,00	5.772.391.663,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	216.600.000,00	216.600.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.500.000,00	12.500.000,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50.539.000,00	0,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.663.648,00	2.463.398,00
6.	Dinas Sosial	26.000.000,00	26.000.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	40.171.100,00	0,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.741.000,00	34.632.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175.470.000,00	170.470.000,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.000.000,00	10.000.000,00
11.	Dinas Perhubungan	427.770.850,00	395.994.700,00
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.371.700,00	7.371.700,00
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.469.000,00	246.269.000,00
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.015.968.408,60	3.015.968.408,60
15.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	2.736.890.200,00	2.533.587.000,00
16.	Ex. Dinas Kehutanan	4.211.472.027,00	4.211.472.027,00
17.	Ex. Dinas Perkebunan	0,00	203.303.200,00
18.	Ex. Dinas Pertambangan dan Energi	95.149.968,00	95.149.968,00
19.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000.000,00	10.000.000,00
20.	Sekretariat Daerah	1.645.772.520,00	1.054.850.920,00
21.	Sekretariat DPRD	550.103.500,00	540.103.500,00
22.	Kecamatan Murung	29.000.000,00	24.000.000,00
23.	Kecamatan Tanah Siang	6.750.000,00	6.150.000,00
24.	Kecamatan Laung Tuhup	43.860.000,00	43.860.000,00
25.	Kecamatan Permata Intan	900.000,00	150.000,00
26.	Kecamatan Sumber Barito	27.000.000,00	27.000.000,00
27.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	5.000.000,00	5.000.000,00
28.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	20.420.000,00	20.420.000,00
29.	Kecamatan Sei Babuat	11.600.000,00	11.200.000,00
30.	Kecamatan Uut Murung	31.900.000,00	31.900.000,00
31.	Kecamatan Seribu Riam	10.000.000,00	10.000.000,00
32.	Inspektorat	45.960.000,00	44.010.000,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	859.813.000,00	859.813.000,00
34.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	27.800.000,00	27.800.000,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	99.585.000,00	99.585.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.090.349.124,60</b>	<b>19.780.015.484,60</b>

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp23.090.349.124,60 berasal dari penambahan aset dari belanja modal aset tetap lainnya. Pengurangan aset tetap lainnya berasal dari reklasifikasi keluar dan koreksi keluar. Rincian disajikan pada tabel berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Uraian	Nilai (Rp)	
Saldo Awal		19.780.015.484,60
Penambahan		
Belanja Modal	1.292.856.886,00	
Reklasifikasi Masuk	2.071.204.674,00	
Koreksi Ekstrakomptabel	776.052.660,00	
Jumlah Penambahan		4.140.114.220,00
Pengurangan		
Reklasifikasi Keluar	558.145.280,00	
Koreksi Keluar Ekstrakomptabel	271.635.300,00	
Jumlah Pengurangan		829.780.580,00
Saldo Akhir		23.090.349.124,60

**Belanja Modal**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	960.000.486,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	99.158.300,00
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56.150.000,00
4.	Sekretariat Daerah	167.700.000,00
5.	Kecamatan Uut Murung	9.848.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.292.856.886,00</b>

**Reklasifikasi Masuk**

- Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari beban Barang dan Jasa dana BOS ke aset tetap lainnya buku perpustakaan BOS sebesar Rp1.855.855.674,00 dan dari peralatan mesin alat peraga sekolah ke aset tetap lainnya barang bercorak kebudayaan sebesar Rp149.810.000,00;
- Reklasifikasi KDP jalan desa ke aset tetap lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp50.539.000,00;
- Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin berupa meubelair pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.000.000,00.

**Ekstrakomptabel**

- Koreksi Ekstrakomptabel buku perpustakaan BOS yang akan diserahkan ke Provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp126.145.660,00;
- Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.200.250,00;
- Koreksi Ekstrakomptabel buku ilmu sosial tahun 2016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp309.000,00;
- Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya buku umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.000.000,00;
- Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya buku umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp31.776.150,00;



## Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

- f. Koreksi Ekstrakomptabel pada Sekretariat Daerah berupa aset tetap lainnya buku umum sebesar Rp383.947.733,34 dan alat olahraga lainnya sebesar Rp191.973.866,66;
- g. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya barang bercorak kebudayaan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp10.000.000,00;
- h. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya barang perpustakaan pada Kecamatan Murung sebesar Rp5.000.000,00;
- i. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya barang bercorak kebudayaan pada Kecamatan Tanah Siang sebesar Rp600.000,00;
- j. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya buku umum pada Kecamatan Permata Intan sebesar Rp750.000,00;
- k. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya buku ilmu sosial pada Kecamatan Sungai Babuat sebesar Rp400.000,00;
- l. Koreksi Ekstrakomptabel aset tetap lainnya buku umum pada Inspektorat sebesar Rp1.950.000,00.

### **Reklasifikasi Keluar**

- a. Reklasifikasi ke aset lain-lain yang akan diserahkan ke Provinsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp329.095.280,00;
- b. Reklasifikasi aset tetap lainnya aset tetap renovasi ke bangunan gedung kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp31.350.000,00;
- c. Reklasifikasi ke aset lain-lain pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp30.000.000,00;
- d. Reklasifikasi aset tetap lainnya aset tetap renovasi ke bangunan gedung tempat kerja lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp167.700.000,00.

### **Koreksi Keluar Ekstrakomptabel**

- a. Koreksi barang Ekstrakomptabel buku pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp58.987.200,00;
- b. Koreksi barang Ekstrakomptabel buku umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp202.800.000,00
- c. Koreksi barang ekstrakomptabel buku pada Kecamatan Uut Murung sebesar Rp9.848.100,00.

### **5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.351.482.490,00 dan Rp10.932.365.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	148.600.000,00	148.600.000,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.413.551.490,00	7.819.056.800,00
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.781.383.500,00	2.863.690.000,00
4.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	7.947.500,00	101.018.250,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.351.482.490,00</b>	<b>10.932.365.050,00</b>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 pada masing-masing SOPD dapat disajikan sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Perencanaan halaman SDN Olung Muro SPK No. 425/024/SPK/Disdikbud/2017	6.400.000,00
	Honorarium PPHP dan Tim Pengelola Teknis Kegiatan	11.488.750,00
	Sub total	17.888.750,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	KJPP penilaian tanah untuk workshop PU di Kecamatan Permata Intan, Tanah Siang dan KJPP untuk lokasi PDAM Bahitom	148.600.000,00
	Pembangunan Gedung Kantor BPKAD No. Kontrak 602/02.2/PPI/CK-PU/VI/2016	1.756.279.000,00
	Pembangunan Gedung Arsip Dinas PUPR No. Kontrak 602/01.2/PPI/CK-PU/VI/2016	3.331.111.240,00
	Perencanaan Pembangunan Halaman Kantor Polsek Tanah Siang No. Kontrak 602/39.2/PRCN ABT PPI/CK-PU/VI/2016	14.650.000,00
	Perencanaan/Pengawasan Taman Kantor Dinas PU No. Kontrak 602/05.2/PGWNPPI/CKPU/X/2015	8.200.000,00
	Pembangunan Mess Daerah baru No. Kontrak 602/35.2/PPI/CK-PU/VI/2016	3.781.383.500,00
	Sub total	9.040.223.740,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
	Perencanaan Pembangunan Jalan Desa Tawai Haui No. Kontrak 622/19.2/PSUDisPKPP/IV/2017	7.947.500,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	
	Perencanaan pembangunan kantor No. Kontrak 027/27/POL.PPKP/PBJP/SPK/2017	49.100.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Perencanaan pembangunan kantor No. Kontrak 027/367/Nakertrans/2017	39.450.000,00
6.	Dinas Perhubungan	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Media Center dan Honor Pengelola Teknis Kegiatan No. Kontrak 027/1033/SP-Kominfo/VI/2016	99.750.000,00
	Perencanaan Teknis Pembangunan Titian Penghubung No. Kontrak 027/282/SPK-LLAJ/2016	49.900.000,00
	Study Master Plan Daerah Pergeseran No. Kontrak 027/02/SMPK-Dishub/IV/2017	1.545.732.500,00
	Study Rencana Teknis Terinci Sisi Udara No. Kontrak 027/22/SPMK-DISHUB/VI/2017	1.782.790.000,00
	Study Rencana Teknis Sisi Darat No. Kontrak 027/20/SPMK/DISHUB/VI/2017	1.281.500.000,00
	Sub total	4.759.672.500,00
7.	Sekretariat Daerah	
	Pembangunan Menara Pandang dan Penataan Lingkungan Halaman Eks. Kantor Pembantu Bupati No. Kontrak 640/PERLENGKAPAN/SETDA/VII/2016	526.010.000,00
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pembangunan Aula BKD No. Kontrak 640/66/SPBKD/XI/2015	858.340.000,00
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Arsip dan Depo Arsip No. Kontrak 040/40/SPK-KPAD/2015	367.950.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Nilai (Rp)
10.	Kecamatan Murung	
	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor No. Kontrak 027/040/spk.prcn/km-mr/2016	44.900.000,00
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga No. Kontrak 027/02/VII/Parsepor/2015	540.600.000,00
	Perencanaan Pembangunan Objek Wisata Air Terjun Tosah dan Air Terjun Bumbun No. Kontrak 027/75/PAR/VIII/2015	99.400.000,00
	Sub total	640.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>16.351.482.490,00</b>

**5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp959.807.571.942,00) dan (Rp796.768.993.778,83) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	(286.090.089.371,00)	(260.908.668.939,83)
2.	Gedung dan Bangunan	(144.784.873.406,00)	(121.502.342.239,00)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(528.932.609.165,00)	(414.357.982.600,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(959.807.571.942,00)</b>	<b>(796.768.993.778,83)</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 pada masing-masing SOPD dapat disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(23.566.194.247,00)	(26.431.235.400,00)
2.	Dinas Kesehatan	(46.722.957.345,00)	(41.911.418.285,00)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(17.490.872.642,00)	(14.178.136.700,00)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(569.986.883.544,00)	(449.276.843.072,00)
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(306.024.705,00)	(0,00)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.042.937.771,00)	(2.042.937.771,00)
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(1.934.258.251,00)	(1.905.972.652,00)
8.	Dinas Sosial	(12.775.378,00)	(4.455.345.845,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.465.763.855,00)	(0,00)
10.	Dinas Ketahanan Pangan	(1.597.813.662,00)	(1.368.316.980,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup	(6.621.142.386,00)	(5.343.878.476,00)
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(4.310.109.938,00)	(3.338.701.213,00)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.385.191.967,00)	(5.527.526.509,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(4.790.091.628,00)	(3.750.602.523,00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.288.697.600,00)	(1.029.377.963,00)
16.	Dinas Perhubungan	(9.752.628.661,00)	(0,00)
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(13.780.779,00)	(9.733.745.345,00)



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.694.731.489,00)	(1.397.974.904,00)
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.751.236.501,00)	(196.820.529,00)
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(6.277.281.316,00)	(5.395.363.322,00)
21.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	(19.929.148.148,00)	(11.209.131.602,00)
22.	Ex. Dinas Kehutanan	(10.311.890.169,00)	(11.002.196.835,00)
23.	Ex. Dinas Perkebunan	(0,00)	(6.496.302.440,00)
24.	Ex. Dinas Pertambangan dan Energi	(29.197.954.142,00)	(29.582.208.753,00)
25.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(6.080.635.337,00)	(5.131.913.686,00)
26.	Sekretariat Daerah	(114.885.566.222,00)	(95.083.905.664,01)
27.	Sekretariat DPRD	(23.201.196.557,00)	(21.655.268.359,00)
28.	Kecamatan Murung	(3.369.406.401,00)	(2.559.820.855,00)
29.	Kecamatan Tanah Siang	(1.886.555.344,00)	(1.884.587.564,00)
30.	Kecamatan Laung Tuhup	(2.351.140.395,00)	(2.754.165.941,00)
31.	Kecamatan Permata Intan	(3.168.962.843,00)	(2.900.760.991,00)
32.	Kecamatan Sumber Barito	(3.070.882.734,00)	(2.625.674.044,00)
33.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	(1.926.067.064,00)	(1.628.034.398,00)
34.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	(1.449.131.451,00)	(1.447.522.031,00)
35.	Kecamatan Sei Babuat	(1.342.377.283,00)	(1.040.262.224,00)
36.	Kecamatan Uut Murung	(3.331.565.801,00)	(2.776.743.560,00)
37.	Kecamatan Seribu Riam	(2.542.852.008,00)	(2.049.993.143,00)
38.	Inspektorat	(2.920.461.760,00)	(3.257.961.760,00)
39.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(6.719.473.322,00)	(6.000.252.323,82)
40.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(5.390.459.593,00)	(4.335.972.504,00)
41.	Badan Pendapatan Daerah	(1.337.004.559,00)	(813.620.319,00)
42.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.383.467.144,00)	(3.248.497.293,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(959.807.571.942,00)</b>	<b>(796.768.993.778,83)</b>

Saldo Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2017 (Rp959.807.571.942,00) berasal dari penambahan dan pengurangan penyusutan di tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>(796.768.993.778,83)</b>
<b>Penambahan</b>	
Beban Penyusutan	180.126.423.857,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi	2.438.190.175,18
Reklas Masuk Antar SOPD Akumulasi Penyusutan	11.976.022.432,00
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>(194.540.636.464,18)</b>
<b>Pengurangan</b>	
Penghapusan Akumulasi Penyusutan	14.652.193.478,01
Koreksi Utang	5.260.398.391,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Uraian	Nilai (Rp)	
Reklas Antar SOPD	11.589.466.432,00	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>31.502.058.301,01</b>
<b>Jumlah</b>		<b>(959.807.571.942,00)</b>

Penambahan dari beban penyusutan per SOPD di tahun 2017 sebesar Rp180.641.205.065,33. Nilai tersebut termasuk di dalamnya Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp514.781.208,33. Beban penyusutan tersebut dirinci sebagai berikut.

**Beban Penyusutan**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.257.109.564,67	6.855.626.937,00
2.	Dinas Kesehatan	4.940.947.541,00	3.591.497.631,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	3.610.625.166,33	3.114.603.762,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.710.040.472,00	93.325.482.132,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	306.024.705,00	0,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	354.204.568,00	368.662.574,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	265.509.022,00	278.723.299,00
8.	Dinas Sosial	12.775.378,00	963.171.385,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	996.028.017,00	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	227.938.348,00	231.948.294,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1.133.397.028,00	1.045.489.985,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	971.408.725,00	881.033.405,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	890.569.261,00	996.545.920,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	708.826.503,00	790.074.178,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.477.970,33	253.838.483,00
16.	Dinas Perhubungan	1.702.627.699,00	1.713.759.365,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.780.779,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	308.133.633,00	79.409.165,00
19.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	222.727.582,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	301.642.338,00	147.045.474,00
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	901.717.994,00	896.216.812,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	2.739.064.106,00	1.518.583.388,00
23.	Dinas Kehutanan	0,00	2.191.794.573,00
24.	Dinas Perkebunan	0,00	1.573.780.312,00
25.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	4.594.008.723,00
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	948.128.350,00	892.652.764,00
27.	Sekretariat Daerah	21.323.178.327,66	15.929.304.100,00
28.	Sekretariat DPRD	2.011.757.109,00	2.221.291.543,00
29.	Kecamatan Murung	598.945.755,00	628.616.740,00
30.	Kecamatan Tanah Siang	276.224.224,00	242.940.989,00
31.	Kecamatan Laung Tuhup	502.548.075,00	428.596.905,00
32.	Kecamatan Permata Intan	526.428.295,00	496.086.138,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
33.	Kecamatan Sumber Barito	373.420.632,00	385.141.027,00
34.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	298.032.672,00	301.471.206,00
35.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	374.131.215,00	317.868.747,00
36.	Kecamatan Sei Babuat	304.121.239,00	281.696.321,00
37.	Kecamatan Uut Murung	479.448.273,00	441.698.280,00
38.	Kecamatan Seribu Riam	492.858.865,00	463.311.182,00
39.	Inspektorat	534.899.046,00	614.088.488,00
40.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	953.170.998,67	967.225.574,82
41.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	867.768.463,00	986.071.670,00
42.	Badan Pendapatan Daerah	538.384.242,00	495.447.278,00
43.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	621.910.465,67	521.234.670,00
	<b>Jumlah</b>	<b>180.641.205.065,33</b>	<b>152.248.767.001,82</b>

**5.3.1.4 Aset Lainnya**

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp67.447.204.759,11 dan Rp10.370.817.825,54.

**5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.711.081.432,00 dan Rp1.711.081.432,00 atas Potongan PFK PPh 21 yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

**5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud**

Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.003.058.435,21 dan Rp710.209.643,54, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Software	879.514.268,54	546.875.476,87
2.	Website	123.544.166,67	163.334.166,67
	<b>Jumlah</b>	<b>1.003.058.435,21</b>	<b>710.209.643,54</b>

Rincian Aset Tak Berwujud untuk masing-masing SOPD per 31 Desember 2017 sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.080.416,66	44.417.083,33
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	26.810.416,67	0,00
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	575.845.000,00	0,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	3.222.500,00	0,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.498.666,67	42.388.666,67



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.741.666,67	0,00
7.	Dinas Perhubungan	990.000,00	2.970.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.050.375,00
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	13.750.000,00
10.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	57.750.000,00	77.550.000,00
11.	Dinas Kehutanan	50.168.101,87	50.168.101,87
12.	Sekretariat Daerah	36.750.000,01	7.822.916,67
13.	Sekretariat DPRD	39.127.500,00	86.242.500,00
14.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56.566.666,66	222.683.333,33
15.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.307.500,00	0,00
16.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	15.000.000,00
17.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	74.200.000,00	136.166.666,67
	<b>Jumlah</b>	<b>1.003.058.435,21</b>	<b>710.209.643,54</b>

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2017 Rp1.003.058.435,21 merupakan penambahan dari belanja aset tak berwujud Rp224.785.000,00 dikurangi beban amortisasi sebesar (Rp514.781.208,33) dan reklasifikasi dari beban barang dan jasa perencanaan sebesar Rp575.845.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp7.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

**5.3.1.4.3. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain terdiri dari aset Lain-lain (aset yang rusak berat) dan aset lain-lain (Uang Jaminan). Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp64.733.064.891,90 dan Rp7.949.526.750,00. Nilai tersebut merupakan Aset yang Rusak Berat dan Aset yang akan diserahkan ke Provinsi sebagai dampak dari pelimpahan kewenangan ke Provinsi masing-masing sebesar Rp11.155.403.114,90 dan Rp53.577.661.777,00.

**Aset Lain-lain ( Aset yang Rusak Berat )**

Aset lain-lain (aset rusak berat) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.155.403.114,90 dan Rp6.714.428.116,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.750.000,00	14.750.000,00
2.	Dinas Kesehatan	66.770.000,00	66.770.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	177.404.625,00	12.625.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.000.000,00	137.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.950.000,00	28.950.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.360.000,00	10.360.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	43.150.000,00	43.150.000,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64.150.000,00	64.150.000,00
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	107.500.000,00	108.700.000,00
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000,00	0,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
10.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	512.140.000,00	512.140.000,00
11.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	243.320.000,00	164.000.000,00
12.	Dinas Kehutanan	18.945.000,00	18.945.000,00
13.	Dinas Perkebunan	0,00	79.320.000,00
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	166.379.384,00	166.379.384,00
15.	Sekretariat Daerah	3.455.287.406,90	236.300.000,00
16.	Sekretariat DPRD	1.668.996.667,00	1.064.150.000,00
17.	Kecamatan Tanah Siang	7.501.500,00	11.211.500,00
18.	Kecamatan Laung Tuhup	330.032.932,00	330.032.932,00
19.	Kecamatan Permata Intan	85.732.000,00	85.732.000,00
20.	Kecamatan Sumber Barito	64.850.000,00	125.200.000,00
21.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	22.800.000,00	22.800.000,00
22.	Kecamatan Sei Babuat	500.521.300,00	12.900.000,00
23.	Kecamatan Uut Murung	51.166.300,00	51.166.300,00
24.	Kecamatan Seribu Riam	7.500.000,00	7.500.000,00
25.	Inspektorat	64.800.000,00	64.800.000,00
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.925.000,00	12.925.000,00
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.220.971.000,00	3.220.971.000,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.500.000,00	41.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.155.403.114,90</b>	<b>6.714.428.116,00</b>

Aset Lain-lain sebesar Rp53.577.661.777,00 merupakan aset SOPD yang akan diserahkan ke Provinsi sebagai dampak dari pelimpahan kewenangan ke Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (untuk aset SMAN yang akan diserahkan ke Provinsi)	51.889.120.720,00
2.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk aset ex. Dinas Kehutanan	1.688.541.057,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.577.661.777,00</b>

### **Aset Lain-lain (Uang Jaminan)**

Merupakan jaminan reklamasi pada Dinas Pertambangan dan Energi dalam bentuk Deposito yang ada di PT Bank Negara Indonesia (Persero) cabang Puruk Cahu sebesar Rp1.235.098.634,00. Berdasarkan surat Bupati Murung Raya Nomor 540/365/PTU-DPE tanggal 19 Desember 2016 perihal Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi IUP Eksploitasi, aset lain-lain tersebut di serahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

### **5.3.2. Kewajiban**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.895.915.533,33 dan Rp28.648.878.496,00.

#### **5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Jangka



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Pendek Lainnya. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.895.915.533,33 dan Rp27.413.779.862,00.

**5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.711.081.432,00 dan Rp1.712.613.611,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Utang Pph 21	1.711.081.432,00	1.711.081.432,00
2.	Utang Pph 22	0,00	33.398,00
3.	Utang Pph 23	0,00	292.012,00
4.	Utang PPN	0,00	1.206.769,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.711.081.432,00</b>	<b>1.712.613.611,00</b>

**5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka**

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp361.129.680,33 dan Rp365.710.339,00, dengan rincian sebagai berikut.

1. Rp34.166.667,00 merupakan sewa tempat ATM BNI yang berada di lokasi RSUD Puruk Cahu yang diterima oleh RSUD.
2. Rp223.963.013,00 merupakan pendapatan diterima dimuka yang terdiri dari pajak reklame Rp55.903.734,00 retribusi HO Badan Rp115.915.490,00 retribusi HO Perorangan Rp52.143.789,00 yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Rp103.000.000,33 merupakan pendapatan diterima dimuka untuk sewa lokasi tempat mesin ATM BRI, BNI, dan Bank Pembangunan Kalteng di Kantor Sekretariat Daerah.

**5.3.2.1.3. Beban Yang Masih Harus Dibayar**

Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.123.739.341,00 dan Rp2.021.568.607,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Utang Beban Pegawai	243.967.813,00	0,00
2.	Utang Beban Barang Jasa	879.771.528,00	547.438.607,00
3.	Utang Beban Hibah	0,00	1.474.130.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.123.739.341,00</b>	<b>2.021.568.607,00</b>

1. Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp243.967.813,00 merupakan utang JKK – JKM tahun 2017 berdasarkan surat PT Taspen (Persero) No. SRT-36/C.1.4/012018 tanggal 24 Januari 2018 tentang kekurangan iuran program JKK –JKM Juli sampai dengan Desember 2017 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Saldo utang beban barang jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp879.771.528,00 merupakan interensif, jasa medis, dan jasa medis BPJS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

3. Saldo utang beban barang dan jasa untuk tahun 2016 sebesar Rp547.438.607,00 telah dibayarkan.
4. Saldo utang beban hibah untuk tahun 2016 sebesar Rp1.474.130.000,00 telah teralisasi pembayarannya pada tahun 2017 yang terdiri dari Rp1.329.910.000,00 pada Sekretariat Daerah, sebesar Rp92.520.000,00 pada Sekretariat Daerah yang merupakan utang ex. Dinas Kehutanan, serta sebesar Rp51.700.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp699.965.080,00 dan Rp23.313.887.305,00. Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2017 merupakan saldo utang pengadaan aset tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih belum terealisasi.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	101.637.500,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	699.965.080,00	21.838.579.305,00
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	823.800.000,00
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	133.721.000,00
5.	Sekretariat Daerah	0,00	79.630.000,00
6.	Dinas Kehutanan	0,00	265.611.000,00
7.	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	36.000.000,00
8.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	34.908.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>699.965.080,00</b>	<b>23.313.887.305,00</b>

**5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.235.098.634,00.

**5.3.2.2.1. Utang Jangka Panjang Lainnya**

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2016 merupakan jaminan reklamasi atas kegiatan pertambangan di Kabupaten Murung Raya, jaminan reklamasi tersebut berupa Deposito yang ditempatkan di Bank BNI Cabang Puruk Cahu, yang telah diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Bupati Murung Raya No.540/365/PTU-DPE tanggal 19 Desember 2016 perihal Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi IUP Eksploitasi. Jaminan Kesungguhan dan Jaminan Reklamasi tersebut dalam bentuk deposito dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nominal (Rp)
1.	PT Loa Haur (PAA787996)	263.011.869,00
2.	PT Batu Mulia Kalimantan (PAA787999)	55.034.604,00
3.	PT Naan Bara Abadi (PAB097551)	53.518.073,00
4.	PT Ardipo Global Perdana (PAB097552)	53.518.073,00
5.	PT Trikarsa Manunggal Jaya (PAB097556)	53.827.603,00
6.	PT Hanson Coal Energy (PAB097554)	53.827.603,00
7.	PT Bahitom Bara Energi (PAB097555)	59.210.367,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	Nominal (Rp)
8.	PT Artha Bimo Gemilang Coalindo (PAB0150679)	53.210.331,00
9.	PT Bumi Mura Kalteng (PAB097575)	58.531.363,00
10.	PT Murung Raya Bara (PAB015068)	53.210.331,00
11.	PT Laas Bara Khatulistiwa (PAB097572)	53.210.331,00
12.	PT Sumber Bara Abadi Mineral (PAB097573)	53.210.331,00
13.	PT Sriwijaya Mineral Bauksit (PAB0150681)	53.210.331,00
14.	PT Energi Persada Khatulistiwa (PAB0150677)	58.531.363,00
15.	PT Pakuwono Resources Mineral (PAB01506833)	58.531.363,00
16.	PT Nemoasia (PAB0150726)	53.005.167,00
17.	PT Maruwai Bara Abadi (PAB0150692)	53.210.331,00
18.	PT Alam Bumi Karya Abadi (PAB0150700)	53.071.904,00
19.	PT Airys Bara Energi (PAB0150736)	42.217.296,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.235.098.634,00</b>

**5.3.3. Ekuitas**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.873.113.042.089,64 dan Rp2.713.435.423.709,51.

**5.4. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL**

**5.4.1. Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan - LO untuk Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.067.099.808.116,73 dan Rp1.192.539.704.255,86.

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO**

Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO. Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp72.514.823.349,72 dan Rp33.102.162.939,48.

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.914.598.767,00 dan Rp6.288.715.397,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pajak Hotel – LO	62.348.000,00	61.421.500,00
2.	Pajak Restoran – LO	3.006.396.616,00	2.939.693.607,00
3.	Pajak Hiburan – LO	22.702.500,00	29.457.500,00
4.	Pajak Reklame – LO	132.779.463,00	174.989.278,00
5.	Pajak Penerangan Jalan – LO	2.123.306.946,00	1.531.154.363,00
6.	Pajak Sarang Burung Walet – LO	78.000.000,00	53.100.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.298.450,00	55.729.105,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	1.361.108.567,00	1.316.794.748,00
9.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	126.658.225,00	126.375.296,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.914.598.767,00</b>	<b>6.288.715.397,00</b>

**5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.816.609.378,00 dan Rp2.000.116.056,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum – LO	1.660.731.527,00	978.063.008,00
2.	Retribusi Jasa Usaha – LO	999.554.000,00	876.937.500,00
3.	Retribusi Perijinan Tertentu – LO	156.323.851,00	145.115.548,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.816.609.378,00</b>	<b>2.000.116.056,00</b>

**Retribusi Jasa Umum - LO**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas- LO	715.811.196,00	586.644.708,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu- LO	4.710.000,00	9.131.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah- LO	440.039.031,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan- LO	0,00	79.284.000,00
5.	Retribusi Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembangunan Sementara- LO	85.010.000,00	0,00
6.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	5.150.000,00	14.850.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran - LO	25.600.000,00	29.458.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Pasar-Los - LO	318.503.800,00	226.222.800,00
9.	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios - LO	0,00	3.005.000,00
10.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO	65.907.500,00	29.467.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.660.731.527,00</b>	<b>978.063.008,00</b>

**Retribusi Jasa Usaha - LO**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan- LO	235.450.000,00	236.820.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruangan- LO	44.700.000,00	86.400.000,00
3.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor- LO	541.400.000,00	494.850.000,00
4.	Retribusi Kursi, Tenda dan Sound System - LO	8.225.000,00	0,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir- LO	76.850.000,00	32.300.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan- LO	22.287.000,00	12.645.000,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi- LO	0,00	2.100.000,00
8.	Retribusi Tempat Pariwisata- LO	1.250.000,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga- LO	69.392.000,00	11.822.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>999.554.000,00</b>	<b>876.937.500,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**Retribusi Perizinan Tertentu - LO**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan- LO	46.052.750,00	38.784.000,00
2.	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi – LO	42.212.474,00	7.286.720,00
3.	Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO	68.058.627,00	99.044.828,00
	<b>Jumlah</b>	<b>156.323.851,00</b>	<b>145.115.548,00</b>

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.127.671.382,00 dan Rp4.796.757.528,95 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Penerimaan Pembagian Laba dari PT. Bank Kalteng	6.103.945.251,00	4.782.373.438,18
2.	Penerimaan Deviden PT.Jamkrida Kalteng Tahun Buku 2016	23.726.131,00	14.384.090,77
	<b>Jumlah</b>	<b>6.127.671.382,00</b>	<b>4.796.757.528,95</b>

**5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp56.655.943.822,72 dan Rp20.016.573.957,53, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO	1.230.936.800,00	669.496.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro – LO	5.322.625.369,00	6.315.414.548,60
3.	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	147.588.043,00	274.238.047,00
4.	Pendapatan Denda Pajak – LO	9.255.229,00	8.428.355,00
5.	Pendapatan Denda Retribusi – LO	4.709.001,00	14.526.001,00
6.	Pendapatan Dari Pengembalian – LO	0,00	267.595.400,00
7.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	6.755.378,00	12.367.926,00
8.	Pendapatan BLUD – LO	27.420.775.496,00	9.280.083.411,00
9.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	2.111.111.428,72	3.174.424.268,93
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	2.555.048.008,00	0,00
11.	Pendapatan Yang Bersumber dari Dana BOS - LO	17.819.030.000,00	0,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian Dana Sertifikasi - LO	28.109.070,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.655.943.822,72</b>	<b>20.016.573.957,53</b>

**5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO**

Pendapatan Transfer - LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer – LO untuk periode yang berakhir 31



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp993.352.423.587,01 dan Rp1.057.237.241.965,38

**5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp959.263.097.951,00 dan Rp1.033.953.475.648,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak – LO	24.349.983.962,00	43.521.697.029,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	113.147.355.051,00	151.182.589.382,00
3.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	667.654.598.000,00	678.555.108.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	154.111.160.938,00	160.694.081.237,00
	<b>Jumlah</b>	<b>959.263.097.951,00</b>	<b>1.033.953.475.648,00</b>

**Bagi Hasil Pajak-LO**

Bagi Hasil Pajak-LO merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Murung Raya periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp24.349.983.962,00. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	13.878.827.904,00	34.137.487.822,00
2.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	17.590.650,00	14.722.850,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	2.225.308.250,00	2.710.961.100,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	6.048.595.596,00	6.658.460.521,00
5.	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	49.395.889,00	64.736,00
6.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Bagian Pemerintah Pusat	2.130.265.673,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.349.983.962,00</b>	<b>43.521.697.029,00</b>

**Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO**

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.113.147.355.051,00 dapat dirinci pada tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	2.480.281.151,00	13.181.433.041,00
2.	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan – LO	7.750.096.868,00	8.748.210.490,00
3.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO	8.237.554.414,00	23.353.659.495,00
4.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	29.247.470.700,00	32.085.359.727,00
5.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	64.756.315.015,00	72.882.022.842,00
6.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	447.937.200,00	452.025.539,00
7.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	25.232.081,00	318.117.448,00
8.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	202.467.622,00	161.760.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>113.147.355.051,00</b>	<b>151.182.589.382,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**Dana Alokasi Umum (DAU) - LO**

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO ini merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp667.654.598.000,00 dan Rp678.555.108.000,00.

**Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO**

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp154.111.160.938,00 dan Rp160.694.081.237,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan- LO	67.527.605.000,00	0,00
2.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum- LO	1.289.700.000,00	0,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	1.424.100.000,00	0,00
4.	DAK Bidang Kesehatan- LO	16.386.322.250,00	6.119.944.987,00
5.	DAK Bidang Pertanian- LO	2.208.046.000,00	0,00
6.	DAK Bidang Pendidikan- LO	5.886.533.000,00	605.957.000,00
7.	DAK Sarana dan Prasarana Perdagangan- LO	1.584.832.000,00	543.336.000,00
8.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan- LO	0,00	122.190.000,00
9.	DAK Transportasi- LO	0,00	68.094.250,00
10.	DAK Sarana dan Prasarana Penunjang - LO	0,00	89.939.335.000,00
11.	DAK Perumahan, Air Minum dan Sanitasi - LO	0,00	86.601.000,00
12.	DAK Kedaulatan Pangan - LO	0,00	997.721.000,00
13.	DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LO	0,00	22.950.847.000,00
14.	DAK Non Fisik - LO	57.804.022.688,00	39.260.055.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.111.160.938,00</b>	<b>160.694.081.237,00</b>

**5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah - LO	7.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp26.589.325.636,01 dan Rp23.283.766.317,38 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	3.093.477.791,63	10.048.813.867,56
2.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	2.525.318.785,65	1.916.748.549,75
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	15.852.542.021,49	6.642.510.432,53
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	24.223.486,35	8.995.389,88



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
	Permukaan – LO		
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	5.093.763.550,89	4.666.698.077,66
	<b>Jumlah</b>	<b>26.589.325.636,01</b>	<b>23.283.766.317,38</b>

**5.4.1.2.4. Bantuan Keuangan - LO**

Bantuan Keuangan-LO merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan untuk Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan-LO.

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO merupakan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa persediaan, pendapatan sumbangan pihak ketiga, pendapatan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pendapatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.232.561.180,00 dan Rp102.200.299.351,00.

**5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah**

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan atas persediaan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementrian/Lembaga Pemerintah Pusat pada Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.232.561.180,00 dan Rp415.883.554,00.

**5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya**

Pendapatan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp101.784.415.797,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Desa – LO	0,00	74.578.649.000,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	2.410.672.197,00
3.	Pendapatan Yang Bersumber dari Dana BOS - LO	0,00	24.795.094.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>101.784.415.797,00</b>

**5.4.2. Beban**

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer. Realisasi Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.012.721.843.971,86 dan Rp1.077.951.887.156,13.

**5.4.2.1. Beban Operasional**

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Realisasi Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp927.906.157.975,86 dan Rp971.729.896.312,13.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.4.2.1.1. Beban Pegawai**

Realisasi Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp429.591.928.390,00 dan Rp373.157.294.378,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	183.686.443.245,00	192.583.769.578,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	159.319.091.555,00	170.882.664.894,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	3.263.910.000,00	2.289.600.000,00
4.	Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan – LO	0,00	76.372.000,00
5.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LO	181.925.000,00	339.127.714,00
6.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO	64.740.000,00	0,00
7.	Beban Uang Lembur PNS – LO	1.785.337.000,00	1.883.715.500,00
8.	Beban Uang Lembur Non PNS – LO	0,00	19.957.000,00
9.	Beban Honorarium PNS – LO	16.491.145.000,00	0,00
10.	Beban Honorarium Non PNS – LO	63.206.016.590,00	0,00
11.	Beban Pegawai – BLUD – LO	1.548.920.000,00	0,00
12.	Beban Pegawai – BOS – LO	0,00	5.082.087.692,00
13.	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	44.400.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>429.591.928.390,00</b>	<b>373.157.294.378,00</b>

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	198.050.842.155,00	216.208.284.409,00
2.	Dinas Kesehatan	45.561.756.646,00	33.691.165.439,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.690.391.587,00	16.433.308.518,00
4.	BLUD RSUD	1.548.920.000,00	0,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.361.823.462,00	4.619.426.066,00
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.962.620.960,00	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.303.694.347,00	2.264.444.021,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.293.058.325,00	1.224.069.415,00
9.	Dinas Sosial	3.682.522.351,00	0,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.665.862.854,00	2.485.408.749,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	3.404.265.245,00	1.129.962.704,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	4.078.840.262,00	2.204.901.943,00
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.082.921.144,00	2.090.312.769,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.876.372.304,00	2.460.909.962,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.640.604.820,00	2.434.344.852,00
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.549.048.664,00	2.266.042.931,00
17.	Dinas Perhubungan	3.796.424.478,00	2.784.712.982,00
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.058.206.665,00	0,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.345.478.729,00	1.610.779.283,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
20.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	125.104.194,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.511.325.609,00	788.531.197,00
22.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.803.519.232,00	2.695.093.638,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.972.314.919,00	3.771.716.859,00
24.	Dinas Kehutanan	0,00	4.563.088.608,00
25.	Dinas Perkebunan	0,00	2.322.316.821,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	3.387.806.678,00
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.578.619.829,00	2.262.099.468,00
28.	DPRD	8.990.220.838,00	5.843.848.325,00
29.	KDH & WKDH	478.526.492,00	556.108.560,00
30.	Sekretariat Daerah	17.448.856.650,00	9.024.862.842,00
31.	Sekretariat DPRD	3.760.391.647,00	1.964.468.648,00
32.	Kecamatan Murung	4.856.890.744,00	3.947.592.250,00
33.	Kecamatan Tanah Siang	4.202.678.786,00	3.544.752.943,00
34.	Kecamatan Laung Tuhup	4.116.846.992,00	3.424.906.189,00
35.	Kecamatan Permata Intan	3.223.957.635,00	2.221.320.773,00
36.	Kecamatan Sumber Barito	2.608.283.754,00	2.192.925.340,00
37.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	2.363.930.346,00	1.493.886.807,00
38.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	1.761.128.345,00	1.338.228.291,00
39.	Kecamatan Sungai Babuat	1.824.140.231,00	1.283.650.633,00
40.	Kecamatan Uut Murung	1.225.655.569,00	1.047.246.901,00
41.	Kecamatan Seribu Riam	1.378.816.313,00	1.085.617.177,00
42.	Inspektorat	3.533.164.631,00	2.734.157.497,00
43.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembenagan Daerah	5.135.707.663,00	2.859.834.310,00
44.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.254.067.961,00	8.979.539.251,00
45.	Badan Pendapatan Daerah	4.803.406.544,00	3.323.832.804,00
46.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.805.822.662,00	2.466.683.331,00
	<b>Jumlah</b>	<b>429.591.928.390,00</b>	<b>373.157.294.378,00</b>

**5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa**

Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp197.353.609.971,39 dan Rp307.263.688.459,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Bahan Pakai Habis	16.948.023.231,50	19.759.936.533,50
2.	Beban Persediaan Bahan/Material	10.785.845.522,18	18.072.129.319,00
3.	Beban Jasa Kantor	9.085.996.653,00	10.481.288.258,00
4.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.931.064.554,00	5.752.185.141,00
5.	Beban Cetak dan Penggandaan	7.564.269.949,00	10.702.341.333,00
6.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	628.687.500,00	621.339.000,00
7.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	482.500.000,00	948.800.000,00
8.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	137.100.000,00	28.600.000,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
9.	Beban Makanan dan Minuman	8.879.573.534,00	9.663.672.525,00
10.	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.158.886.000,00	2.392.928.300,00
11.	Beban Pakaian Kerja	1.132.532.800,00	1.229.748.500,00
12.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.188.104.000,00	2.107.297.400,00
13.	Beban Perjalanan Dinas	79.223.635.099,84	89.531.496.481,04
14.	Beban Perjalanan Pindah Tugas	5.000.000,00	28.247.500,00
15.	Beban Pemeliharaan	5.549.597.090,00	6.537.411.193,00
16.	Beban Jasa Konsultasi	1.893.296.500,00	4.082.922.250,00
17.	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.500.000,00	44.000.000,00
18.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	630.000.000,00	590.000.000,00
19.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.417.932.293,00	6.256.025.466,00
20.	Beban Honorarium Non Pegawai	1.003.800.000,00	351.800.000,00
21.	Beban Honorarium PNS – LO	59.150.000,00	18.803.926.400,00
22.	Beban Honorarium Non PNS – LO	0,00	57.833.142.720,00
23.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	2.901.040.000,00	3.729.152.000,00
24.	Beban Barang Dana BOS	12.188.161.526,00	17.423.310.706,00
25.	Beban yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2.033.508.024,00	2.164.852.151,00
26.	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Selain Hibah/Bansos	49.464.000,00	2.137.482.000,00
27.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	65.000.000,00
28.	Beban Jasa Layanan Kesehatan	1.077.716.260,00	0,00
29.	Beban Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta/ Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	2.123.359.810,00	1.364.534.596,00
30.	Beban Barang dan Jasa BLUD	20.989.015.624,87	8.560.375.486,46
31.	Beban Dana Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	5.999.743.200,00
32.	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan	251.350.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>197.353.609.971,39</b>	<b>307.263.688.459,00</b>

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.811.329.141,00	41.231.990.488,00
2.	Dinas Kesehatan	18.778.281.181,58	22.719.655.344,36
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	5.490.284.397,60	13.192.429.052,54
4.	BLUD RSUD	20.989.015.624,87	8.560.375.486,46
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.445.261.797,50	13.138.314.042,26
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.536.362.640,00	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.257.522.714,00	3.069.597.581,38
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.027.820.877,00	3.546.470.200,00
9.	Dinas Sosial	2.690.107.370,00	0,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.152.937.769,24	5.078.929.958,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan	2.715.422.854,00	2.738.958.061,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	3.524.114.075,50	8.382.895.813,00



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016**

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.290.032.092,00	3.297.914.042,00
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.795.182.758,00	5.031.841.531,00
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.441.811.805,00	7.723.945.736,00
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.620.887.744,00	5.095.150.215,00
17.	Dinas Perhubungan	2.288.346.404,00	5.888.583.477,00
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.348.755.312,00	0,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.402.278.856,00	1.919.913.568,00
20.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	311.016.748,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.721.511.614,00	2.401.763.695,00
22.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.597.652.558,00	7.391.618.954,00
23.	Dinas Pertanian dan Perikanan	7.467.717.629,00	7.826.124.329,00
24.	Dinas Kehutanan	0,00	12.905.613.911,00
25.	Dinas Perkebunan	0,00	8.326.203.084,00
26.	Dinas Pertambangan dan Energi	7.659.878,00	2.110.550.646,00
27.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.575.252.807,00	4.458.533.358,00
28.	Sekretariat Daerah	29.042.634.976,00	41.671.911.751,00
29.	Sekretariat DPRD	14.142.628.862,00	20.888.409.538,00
30.	Kecamatan Murung	2.735.843.360,00	3.713.420.025,00
31.	Kecamatan Tanah Siang	1.150.396.689,00	1.989.708.854,00
32.	Kecamatan Laung Tuhup	2.063.998.229,00	2.468.728.044,00
33.	Kecamatan Permata Intan	2.471.430.091,00	2.831.867.048,00
34.	Kecamatan Sumber Barito	1.164.700.561,00	1.278.226.916,00
35.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	642.554.738,00	1.284.868.000,00
36.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	1.300.424.222,00	1.535.118.214,00
37.	Kecamatan Sungai Babuat	704.083.132,00	1.270.607.950,00
38.	Kecamatan Uut Murung	1.310.188.534,00	1.275.433.916,00
39.	Kecamatan Seribu Riam	1.568.481.045,00	1.444.613.504,00
40.	Inspektorat	2.924.085.460,00	3.738.654.552,00
41.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanagan Daerah	3.109.744.853,00	8.557.855.606,00
42.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.118.866.799,00	5.730.540.087,00
43.	Badan Pendapatan Daerah	2.686.292.636,00	6.144.772.305,00
44.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.241.705.885,10	5.090.562.828,00
	<b>Jumlah</b>	<b>197.353.609.971,39</b>	<b>307.263.688.459,00</b>

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp197.353.609.971,39 termasuk didalamnya Beban Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 senilai Rp12.188.161.526,00 dan Rp2.033.508.024,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan entitas sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disajikan pada tabel berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri	8.267.277.330,00	0,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	3.920.884.196,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.188.161.526,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Beban Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan entitas puskesmas penerima dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Puskesmas Puruk Cahu	587.365.060,00	0,00
2.	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	78.374.288,00	0,00
3.	Puskesmas Mangkahui	159.789.280,00	0,00
4.	Puskesmas Konut	67.721.320,00	0,00
5.	Puskesmas Saripoi	176.236.470,00	0,00
6.	Puskesmas Muara Laung	221.401.301,00	0,00
7.	Puskesmas Muara Tuhup	74.676.690,00	0,00
8.	Puskesmas Batu Bua	103.494.720,00	0,00
9.	Puskesmas Makunjung	31.056.220,00	0,00
10.	Puskesmas Tumbang Lahung	256.510.725,00	0,00
11.	Puskesmas Tumbang Bantian	41.115.845,00	0,00
12.	Puskesmas Tumbang Kunyi	90.280.815,00	0,00
13.	Puskesmas Muara Joloi	98.055.965,00	0,00
14.	Puskesmas Tumbang Olong	47.429.325,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.033.508.024,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan SOPD ditambah dengan Beban Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ditambah dengan Beban Barang dan Jasa Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlahnya menjadi Rp197.353.609.971,39 dan Rp307.263.688.459,00.

#### **5.4.2.1.3. Beban Subsidi**

Realisasi Beban Subsidi merupakan subsidi yang diberikan kepada PDAM Murung Raya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp749.482.325,00 dan Rp7.795.168.259,00.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Subsidi Tarif Air Minum	749.482.325,00	999.936.159,00
2.	Pelayanan Kesehatan Kartu Mura Sehat (KMS)	0,00	6.795.232.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>749.482.325,00</b>	<b>7.795.168.259,00</b>

#### **5.4.2.1.4. Beban Hibah**

Realisasi Beban Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp91.152.004.252,00 dan Rp120.520.412.360,00, dengan rincian sebagai berikut.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	56.894.126.752,00	103.557.557.360,00
2.	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	34.257.877.500,00	16.962.855.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>91.152.004.252,00</b>	<b>120.520.412.360,00</b>

**5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Program Kartu Murung Raya Sehat (KMS), dan Pelayanan Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Realisasi Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp25.394.836.339,00 dan Rp4.248.360.000,00.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.780.832.300,00	4.248.360.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Kartu Mura Sehat (KMS)	18.119.964.039,00	0,00
3.	Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	494.040.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25.394.836.339,00</b>	<b>4.248.360.000,00</b>

**5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp180.641.205.065,33 dan Rp152.837.028.696,28, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.059.854.065,00	42.324.805.426,82
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.332.902.105,00	19.959.798.534,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.733.667.687,00	89.964.163.041,00
4.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	514.781.208,33	588.261.694,46
	<b>Jumlah</b>	<b>180.641.205.065,33</b>	<b>152.837.028.696,28</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi posisi 31 Desember 2017 dan 2016 per SOPD, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.257.109.564,67	6.904.081.937,00
2.	Dinas Kesehatan	4.940.947.541,00	3.596.455.964,33
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	3.610.625.166,33	3.114.603.762,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.710.040.472,00	93.325.482.132,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	306.024.705,00	0,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	354.204.568,00	368.662.574,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	265.509.022,00	278.723.299,00
8.	Dinas Sosial	12.775.378,00	0,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	996.028.017,00	963.171.385,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	227.938.348,00	231.948.294,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1.133.397.028,00	1.045.489.985,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	971.408.725,00	881.033.405,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	890.569.261,00	1.029.199.753,33



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	708.826.503,00	790.074.178,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263.477.970,33	253.838.483,00
16.	Dinas Perhubungan	1.702.627.699,00	1.715.739.365,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.780.779,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	308.133.633,00	86.838.665,00
19.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0,00	222.727.582,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	301.642.338,00	163.295.474,00
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	901.717.994,00	916.016.812,00
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.739.064.106,00	1.518.583.388,00
23.	Dinas Kehutanan	0,00	2.282.405.434,13
24.	Dinas Perkebunan	0,00	1.573.780.312,00
25.	Dinas Pertambangan dan Energi	0,00	4.594.008.723,00
26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	948.128.350,00	892.652.764,00
27.	Sekretariat Daerah	21.323.178.327,66	15.985.679.100,00
28.	Sekretariat DPRD	2.011.757.109,00	2.271.624.043,00
29.	Kecamatan Murung	598.945.755,00	628.616.740,00
30.	Kecamatan Tanah Siang	276.224.224,00	242.940.989,00
31.	Kecamatan Laung Tuhup	502.548.075,00	428.596.905,00
32.	Kecamatan Permata Intan	526.428.295,00	496.086.138,00
33.	Kecamatan Sumber Barito	373.420.632,00	385.141.027,00
34.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	298.032.672,00	301.471.206,00
35.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	374.131.215,00	317.868.747,00
36.	Kecamatan Sungai Babuat	304.121.239,00	281.696.321,00
37.	Kecamatan Uut Murung	479.448.273,00	441.698.280,00
38.	Kecamatan Seribu Riam	492.858.865,00	463.311.182,00
39.	Inspektorat	534.899.046,00	614.088.488,00
40.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	953.170.998,67	1.107.392.241,49
41.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	867.768.463,00	992.321.670,00
42.	Badan Pendapatan Daerah	538.384.242,00	532.113.944,67
43.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	621.910.465,67	597.568.003,33
	<b>Jumlah</b>	<b>180.641.205.065,33</b>	<b>152.837.028.696,28</b>

**5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp527.315.822,14 dan Rp411.566.583,85 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	527.174.440,14	410.175.583,85
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	141.382,00	1.391.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>527.315.822,14</b>	<b>411.566.583,85</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.4.2.1.8. Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain merupakan Ekstrakomptabel aset tetap tahun 2017. Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.495.775.811,00 dan Rp5.496.377.576,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.348.730.150,0
2.	Dinas Kesehatan	283.634.198,00	47.667.745,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	69.996.475,00	334.589.815,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	789.234.350,00	2.339.584.100,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	44.950.160,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	252.506.000,00	0,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	98.765.200,00	53.609.250,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.786.000,00	4.000.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	151.247.909,00	6.956.800,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	28.700.000,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.550.000,00	0,00
16.	Dinas Perhubungan	25.000.000,00	521.103.050,00
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7.286.000,00	0,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.800.000,00	5.488.000,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	67.816.000,00
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	94.315.000,00	25.775.000,00
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan	99.648.000,00	0,00
23.	Ex Dinas Kehutanan	0,00	75.894.406,00
27.	Sekretariat Daerah	75.450.000,00	335.160.200,00
29.	Kecamatan Murung	0,00	99.691.500,00
30.	Kecamatan Tanah Siang	4.000.000,00	0,00
31.	Kecamatan Laung Tuhup	49.790.000,00	0,00
32.	Kecamatan Permata Intan	0,00	24.375.000,00
34.	Kecamatan Tanah Siang Selatan	0,00	3.050.000,00
35.	Kecamatan Barito Tuhup Raya	28.295.000,00	1.392.000,00
36.	Kecamatan Sungai Babuat	0,00	81.684.000,00
37.	Kecamatan Uut Murung	9.848.100,00	24.992.000,00
38.	Kecamatan Seribu Riam	1.996.368,00	0,00
39.	Inspektorat	338.162.000,00	0,00
40.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	59.743.211,00	0,00
41.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	722.000,00	21.168.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.495.775.811,00</b>	<b>5.496.377.576,00</b>

**5.4.2.2. Beban Transfer**

Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan



Keuangan Lainnya. Realisasi Beban Transfer untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp106.221.990.844,00 dan Rp106.221.990.844,00.

#### **5.4.2.2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa. Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp487.350.000,00 dan Rp757.500.000,00.

#### **5.4.2.2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya**

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan beban bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Rp308.700.000,00 dan Rp0,00.

#### **5.4.2.2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan beban bantuan keuangan ke pemerintah provinsi. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Rp245.000.000,00 dan Rp571.450.000,00.

#### **5.4.2.2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa**

Beban Bantuan Keuangan ke Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa-desa di Kabupaten Murung Raya. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp82.978.113.100,00 dan Rp104.147.388.000,00.

#### **5.4.2.2.5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Beban Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Beban transfer bantuan kepada Partai Politik. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 Rp796.522.896,00 dan Rp745.652.844,00.

#### **5.4.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp22.848.720.594,00).

#### **5.4.4. Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp75.000.000,00) dan (Rp587.982.250,00).

#### **5.4.5. Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp54.302.964.144,87 dan Rp91.151.114.255,73.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.5. PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS**

**5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp253.637.558.967,46 dan Rp275.264.271.252,10.

**5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.117.164.957.763,30 dan Rp1.158.467.472.158,14, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Penerimaan Pajak Daerah	7.453.988.062,00	7.226.675.013,00
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	2.810.488.569,00	3.011.164.766,00
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.127.671.382,00	4.796.757.528,95
4.	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	7.644.437.962,05	8.869.350.480,53
5.	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	959.263.097.951,00	1.033.953.475.648,00
6.	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.500.000.000,00	0,00
7.	Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	30.436.180.837,25	26.031.399.721,66
8.	Penerimaan Lainnya	95.929.093.000,00	74.578.649.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.117.164.957.763,30</b>	<b>1.158.467.472.158,14</b>

**5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp863.527.398.795,84 dan Rp883.203.200.906,04, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	427.799.040.577,00	368.075.206.686,00
2.	Pembayaran Barang dan Jasa	159.505.366.545,84	274.768.341.523,04
3.	Pembayaran Subsidi	19.363.486.364,00	7.795.168.259,00
4.	Pembayaran Hibah	69.258.894.013,00	120.328.651.344,00
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	6.780.832.300,00	4.248.360.000,00
6.	Pembayaran Tak Terduga	75.000.000,00	587.982.250,00
7.	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	487.350.000,00	757.500.000,00
	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	308.700.000,00	0,00
8.	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	245.000.000,00	1.622.500.000,00
9.	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	178.907.206.100,00	104.273.838.000,00
10.	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	796.522.896,00	745.652.844,00
	<b>Jumlah</b>	<b>863.527.398.795,84</b>	<b>883.203.200.906,04</b>



### **5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp224.765.350.550,25) dan (Rp391.495.680.081,00).

#### **5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.230.936.800,00 dan Rp669.496.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	1.182.311.800,00	565.770.000,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	17.100.000,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	48.625.000,00	86.626.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.230.936.800,00</b>	<b>669.496.000,00</b>

#### **5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp225.996.287.350,25 dan Rp392.165.176.081,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	3.819.357.500,00	3.912.479.500,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	20.622.612.337,00	30.876.271.090,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	70.560.938.042,75	88.539.938.119,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	123.225.737.584,50	261.851.527.972,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.292.856.886,00	1.631.121.400,00
6.	Perolehan Aset Lainnya	224.785.000,00	103.838.000,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.250.000.000,00	5.250.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>225.996.287.350,25</b>	<b>392.165.176.081,00</b>

### **5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pembiayaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

**5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran**

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.436.981,34 dan Rp1.727.272.925,66.

**5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran**

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp58.940.444.593,79 dan Rp86.935.171.714,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58.938.007.612,45	85.203.929.628,00
2.	Pengembalian sisa kas dari bendahara pengeluaran tahun 2016	2.436.981,34	942.711.413,00
3.	Pengembalian sisa kas dari bendahara penerimaan tahun 2016	0,00	788.530.673,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58.940.444.593,79</b>	<b>86.935.171.714,00</b>

**5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran**

Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp58.938.007.612,45 dan Rp85.207.898.788,34, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	58.938.007.612,45	85.203.929.628,00
2.	Kas di bendaharan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2017	0,00	3.969.160,34
	<b>Jumlah</b>	<b>58.938.007.612,45</b>	<b>85.207.898.788,34</b>

**5.5.5. Kenaikan/(Penurunan Kas)**

Kenaikan/(Penurunan Kas) merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas bersih dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran yang dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	253.637.558.967,46	275.264.271.252,10
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(224.765.350.550,25)	(391.495.680.081,00)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	2.436.981,34	1.727.272.925,66
	<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan Kas) Bersih</b>	<b>28.874.645.398,55</b>	<b>(114.504.135.903,24)</b>

**5.5.6. Saldo Awal Kas di BUD**

Saldo awal kas di BUD tahun 2017 merupakan saldo akhir kas di BUD tahun 2016 sebesar Rp92.015.621.991,82.



#### **5.5.7. Saldo Akhir Kas di BUD**

Saldo akhir kas di BUD tahun 2017 merupakan selisih antara kenaikan/penurunan kas dengan saldo awal kas di BUD sebesar Rp120.890.267.390,37.

#### **5.5.8. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran**

Realisasi saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.969.160,34.

#### **5.5.9. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**

Realisasi saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### **5.5.10. Saldo Akhir Kas**

Saldo akhir kas terdiri dari saldo akhir kas di BUD, saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran, saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan, saldo akhir kas di Bendahara BLUD RSUD, saldo akhir kas di Bendahara JKN/FKTP dan saldo akhir kas di Bendahara BOS dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Saldo akhir kas di BUD	120.890.267.390,37	92.015.621.991,82
2.	Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.969.160,34
3.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4.	Saldo akhir kas di Bendahara BLUD RSUD	3.756.564.118,00	37.659.518,00
5.	Saldo akhir kas di Bendahara JKN/FKTP	2.327.311.819,20	1.898.818.835,20
6.	Saldo akhir kas di Bendahara BOS	168.902.525,98	567.090.896,79
	<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>	<b>127.143.045.853,55</b>	<b>94.523.160.402,15</b>

Saldo akhir kas di Bendahara BOS belum termasuk bunga bank dan biaya administrasi bank.

### **5.6. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

#### **5.6.1. Ekuitas Awal**

Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.713.435.423.709,51 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016.

#### **5.6.2. Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp54.302.964.144,87 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

#### **5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp105.374.654.235,26, dengan rincian sebagai



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

berikut.

**Koreksi Ekuitas Lainnya Yang Menambah Ekuitas**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	535.576,01
2.	Koreksi Penghapusan Akumulasi Penyusutan	10.439.855.514,00
3.	Koreksi Utang Beban	9.500.000,00
4.	Koreksi Ekstrakompatabel	91.500.240.109,00
5.	Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan	4.080.385.281,00
6.	Koreksi Akumulasi Penyusutan	14.484.970.096,01
7.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	4.455.345.845,00
8.	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	19.758.194.470,00
9.	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	2.030.554.451,00
10.	Koreksi Reklas Aset Tetap	4.897.288.107,00
11.	Koreksi Reklas Utang Beban	261.930.000,00
12.	Koreksi Reklas Penyisihan Piutang	55.390.000,00
13.	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap	683.865.663,00
14.	Koreksi Piutang Pajak	1.646.900.089,00
15.	Koreksi Kekurangan Penghapusan Piutang	651.882.626,24
16.	Koreksi Reklas Penyisihan Piutang	1.736.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>154.958.573.927,26</b>

**Koreksi Ekuitas Lainnya Yang Mengurangi Ekuitas**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	232.521.713,28
2.	Koreksi Saldo Kas Bendahara BOS	234.206.033,54
3.	Koreksi Pengakuan Piutang Kurang Salur Dana BOS	34.000.000,00
4.	Koreksi Ekstrakompatabel	432.394.223,30
5.	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	2.206.605.553,18
6.	Koreksi Saldo Awal Reklas Aset Tetap	24.213.540.315,00
7.	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	0,00
8.	Koreksi Reklas Aset Tetap	25.613.891.676,00
9.	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(5.804.254.874,00)
10.	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	3.358.451,00
11.	Koreksi Reklas Piutang Pajak	60.780.000,00
12.	Koreksi Piutang Retribusi	1.857.280,00
13.	Koreksi Lebih Catat Aset Tetap	551.490.665,00
14.	Koreksi Aset Lain-lain	79.670.000,00
15.	Koreksi Pengurangan Penghapusan Piutang	822.361.749,00
16.	Koreksi Reklas Penyisihan Piutang	55.390.000,00
17.	Koreksi Penyisihan Piutang	258.008.406,70
18.	Koreksi Persediaan	588.098.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.583.919.692,00</b>



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

---

**5.6.4. Ekuitas Akhir**

Saldo ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.873.113.042.089,64.

**5.7. INFORMASI LAINNYA**

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/207/Keuda/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Penyerahan P3D dan Pencatatan Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2016, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 aset SMA dan SMK masih dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan penyelesaian serah terima dan pencatatannya akan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.

Sementara menunggu Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, aset SMA dan SMK dicatat pada akun Aset Lain-lain pada Neraca Kabupaten Murung Raya.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2017.

Sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2017, terdiri dari.

<b>No</b>	<b>Nama SOPD</b>
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Dinas Ketahanan Pangan
12.	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
25.	KDH dan WKDH



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

*Catatan Atas Laporan Keuangan*

*Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016*

No	Nama SOPD
26.	Sekretariat Daerah
27.	Sekretariat DPRD
28.	Kecamatan Murung
29.	Kecamatan Tanah Siang
30.	Kecamatan Laung Tuhup
31.	Kecamatan Permata Intan
32.	Kecamatan Sumber Barito
33.	Kecamatan Tanah Siang Selatan
34.	Kecamatan Barito Tuhup Raya
35.	Kecamatan Sungai Babuat
36.	Kecamatan Uut Murung
37.	Kecamatan Seribu Riam
38.	Inspektorat
39.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
40.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
41.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
42.	Badan Pendapatan Daerah
43.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam tahun 2017 juga terjadi pengalihan urusan Pendidikan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, termasuk urusan kepegawaian dan pengalihan aset SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/207/Keuda/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Penyerahan P3D dan Pencatatan Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2016, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 aset SMA dan SMK masih dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan penyelesaian serah terima dan pencatatannya akan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun berdasarkan basis kas, yaitu untuk belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Plt. BUPATI MURUNG RAYA,**

**H. DARMAJI**